

**PENGARUH LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP
PENERIMAAN BEA MASUK**

TESIS

**WIDHI HARTONO
NPM. 6605290363**



**UNIVERSITAS INDONESIA
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
DESEMBER 2008**

**PENGARUH LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP
PENERIMAAN BEA MASUK**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi pada
Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia

WIDHI HARTONO
NPM. 6605290363




**UNIVERSITAS INDONESIA
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
DESEMBER 2008**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : **WIDHI HARTONO**
NPM : **6605290363**

Tanda Tangan : 
Tanggal : **31 Desember 2008**



**UNIVERSITAS INDONESIA
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
DESEMBER 2008**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Widhi Hartono
NPM : 6605290363
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Terhadap
Penerimaan Bea masuk

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Widyono Soetjipto


(.....)

Ketua Sidang : Prof. Dr. Prijono Tjiptoheridjanto


(.....)

Penguji : R.H. Achmadi, SE, M.Sc


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Widyono Soetjipto, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini
- (2) Para dosen dan staff pengajar pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- (3) Pimpinan dan staff pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- (4) Istriku tercinta (Tri Retnaningtyas Johanna) dan ketiga anakku (Kensita Aurora Hartono, Ken Radya Surya Hartono, Kenhana Kirana Hartono) yang dengan luar biasa telah memberikan dukungan moral
- (5) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 31 Desember 2008



Widhi Hartono

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widhi Hartono
NPM : 6605290363
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen :
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Terhadap Penerimaan Bea Masuk”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Widhi Hartono)

ABSTRAK

Nama : Widhi Hartono
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Terhadap Penerimaan Bea Masuk

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi seberapa besar elastisitas Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan bea masuk dan bagaimana pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan bea masuk di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Bruto berpengaruh terhadap variabel penerimaan bea masuk dan mempunyai elastisitas yang positif.

Penerimaan bea masuk (persentase dari PDB) dipengaruhi oleh variabel nilai impor (persentase dari PDB), nilai tukar, dan variabel tarif bea masuk rata-rata, serta variabel *dummy* liberalisasi perdagangan. Variabel *dummy* liberalisasi perdagangan berkoeffisien positif yang berarti liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan bea masuk.

Jika kebijakan pemerintah terhadap penerimaan bea masuk masih diandalkan untuk penerimaan nasional, maka kebijakan liberalisasi perdagangan dengan memfokuskan langkah-langkah kebijakan harmonisasi tarif.

Kata Kunci:

Penerimaan Bea masuk, liberalisasi perdagangan, nilai impor, nilai tukar, tarif bea masuk rata-rata

ABSTRACT

Name : Widhi Hartono
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Impacts of Trade Liberalization to Customs Revenue

This research is intended to assess the elasticity of Gross Domestic Products towards customs revenue in regards with to analyze the impacts of trade liberalization to customs revenue in Indonesia. The results show that the variable of Gross Domestic Products influences the variable of customs revenue with positive elasticity.

Customs revenue (percentage of GDP) is sensitive to the variable of import value (percentage of GDP), exchange rate and average customs tariff, as well as *dummy* variable of trade liberalization. The last variable bears positive coefficient, that is means trade liberalization positively influences customs revenue.

In condition where the government is dependant on customs revenue, the policy of trade liberalization must focus on measures related to tariff harmonization.

Key words:

Customs revenue, trade liberalization, import value, exchange rate, average customs tariff

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Hipotesis	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Metodologi Penelitian	12
1.8 Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Liberalisasi Perdagangan dan Organisasi Perdagangan Dunia.....	22
2.3 Kebijakan Liberalisasi Perdagangan di Indonesia	26
3. METODE PENELITIAN	33
3.1 Metodologi Penelitian	33
3.2 Obyek Penelitian	37
3.3 Data Penelitian	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.2 Analisa dan Pembahasan	63
5. KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR REFERENSI	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	:	Kerangka Pemikiran	11
Gambar 2	:	Metodologi Ekonometrika Modern	20



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 4.1. : Data Bea Masuk (Y) dan Produk Domestik Bruto (X) 64
- Grafik 4.2. : Data Penerimaan Bea Masuk (TR), Nilai Impor (M),
Nilai Tukar (w) dan tarif Bea Masuk rata-rata (r)
tahun 1970-2007 68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :	Hasil Estimasi I Produktivitas Pajak Perdagangan Internasional/Bea Masuk (untuk keterangan Tabel 4.4)	80
Lampiran 2 :	Hasil Uji White Heteroskedasticity Test (<i>cross term</i>) (untuk keterangan Tabel 4.5)	81
Lampiran 3 :	Hasil Estimasi II Produktivitas Pajak Perdagangan Internasional/Bea Masuk (untuk keterangan Tabel 4.7)	82
Lampiran 4 :	Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (untuk keterangan Tabel 4.8)	83
Lampiran 5 :	Hasil Uji White Heteroskedasticity Test (<i>cross term</i>) (untuk keterangan Tabel 4.9)	84
Lampiran 6 :	Estimasi I Pengaruh Liberalisasi Perdagangan pada Bea Masuk dengan data Tahunan 1970-2007 (untuk keterangan Tabel 4.10)	85
Lampiran 7 :	Hasil Pengujian White Heteroskedasticity (No Cross Term) (untuk keterangan Tabel 4.11)	86
Lampiran 8 :	Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (untuk keterangan Tabel 4.12)	87
Lampiran 9 :	Estimasi II Pengaruh Liberalisasi Perdagangan pada Bea Masuk dengan data Tahunan 1970-2007 (untuk keterangan Tabel 4.13)	88
Lampiran 10 :	Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (untuk keterangan Tabel 4.14)	89
Lampiran 11 :	Hasil Pengujian White Heteroskedasticity (No Cross Term) (untuk keterangan Tabel 4.15)	90
Lampiran 12 :	Hasil Pengujian Johansen Cointegration Test (untuk keterangan Tabel 4.16)	91
Lampiran 13 :	Estimasi Error Correction Model (ECM) (untuk keterangan Tabel 4.17)	92

Lampiran 14 :	Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (untuk keterangan Tabel 4.18)	93
Lampiran 15 :	Hasil Pengujian White Heteroskedasticity (Cross Term) (untuk keterangan Tabel 4.19)	94
Lampiran 16 :	Data Penerimaan Bea Masuk dan Produk Domestik Bruto.....	95
Lampiran 17 :	Data Penerimaan Bea Masuk (% dari PDB), Nilai Impor (% dari PDB), Nilai Tukar, Tarif bea masuk rata-rata	96



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Literatur yang membahas mengenai liberalisasi sering menyamakan liberalisasi dengan semakin terbukanya perekonomian suatu negara. Dengan kata lain, suatu negara sedang menjalankan kebijakan liberalisasi bila kebijakan yang diterapkan tersebut menyebabkan perekonomian semakin berorientasi keluar (*outward-oriented*) dan juga *openness*.

Kebijakan liberalisasi adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka. Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi penyamaan insentif (rata-rata) diantara sektor-sektor perdagangan.

Suatu rezim kebijakan dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi bila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin berkurang. Selain itu, kebijakan yang liberal juga dapat ditandai melalui semakin pentingnya peranan perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui beberapa cara seperti pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor (Santos-Paulino, 2005).

Indonesia telah menempatkan nilai penting perdagangan sebagai sumber utama pertumbuhan sejak reformasi besar di bidang perdagangan dan investasi pada pertengahan tahun 1980an. Perdagangan dalam persentase PDB, meskipun bergejolak pada tahun-tahun belakangan ini, meningkat dari sekitar 30% dari PDB pada tahun 1970 menjadi 70% pada tahun 2001.

Pola ini selaras dengan perekonomian dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Singapura, Hong Kong, Jepang, Taiwan, dan Korea sangat berhasil dalam mentransformasi perekonomian mereka, dengan menambah penghasilan dan mengurangi kemiskinan melalui perdagangan.

Meskipun menggunakan perdagangan sebagai sumber pertumbuhan yang penting, Indonesia telah menangkap isyarat dari perkembangan di luar negeri untuk melakukan reformasi. Melonjaknya penjualan minyak bumi di awal 1980an telah mengarah kepada strategi substitusi impor karena Indonesia bergantung

pada penghasilan dari minyak bumi untuk membiayai pembangunan perekonomiannya.

Anjloknya penjualan minyak pada tahun 1980an telah menyebabkan reformasi besar di bidang perdagangan dan investasi karena pertumbuhan harus dibiayai dengan dana dari sektor manufaktur baru yang berorientasi pada ekspor. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 telah menyebabkan liberalisasi perdagangan secara signifikan di awal program IMF yang berupaya untuk menghapuskan struktur-struktur pasar yang kaku.

Deregulasi yang paling penting adalah pada tahun 1986 ketika harga minyak turun drastis dan memaksa pemerintah untuk mereformasi kebijakan perdagangannya antara lain dengan menurunkan tingkat tarif dan mengkonversi beberapa lisensi impor. Kebijakan perdagangan ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor minyak dan gas dan sasaran kebijakan difokuskan untuk meningkatkan ekspor non minyak dan gas (Santos-Paulino & Thirwall, 2002).

Pada bulan Mei 1986 pemerintah memperkenalkan serangkaian deregulasi di sektor perdagangan dengan tujuan untuk mengurangi hambatan bagi perusahaan yang berorientasi ekspor. Langkah awal yang dilakukan adalah memperkenalkan *duty exemption* dan *drawback*. Perusahaan-perusahaan diberikan kemudahan dalam hal pembelian input dengan mengecualikan perusahaan-perusahaan tersebut dari bea impor dan ketentuan-ketentuan impor lainnya.

Sedangkan untuk memenuhi perjanjian GATT, Skema Sertifikat Ekspor yang merupakan sarana promosi ekspor dihapuskan karena merupakan subsidi dan banyak disalahgunakan. Selanjutnya diperkenalkan skema baru yang dikenal sebagai Bapeksta. Eksportir diperbolehkan mengekspor 85% atau lebih dari total produksinya. Sistem yang baru ini lebih efektif dalam efisiensi dan penerapan bebas korupsi.

Paket kebijakan perdagangan lainnya dikeluarkan pada bulan Oktober 1986 dan Januari 1987. Kebijakan ini berisi pencabutan pembatasan kuantitatif impor dan digantikan dengan mengenakan tarif impor.

Pada tahun 1992, Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya saat itu (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand) memutuskan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas di antara mereka. Proyek ini dikenal sebagai AFTA (*Asean Free Trade Area*), dan diputuskan untuk diluncurkan pada Januari 1993. Semula juga diputuskan untuk merealisasikan gagasan ini setelah 15 tahun, yaitu tahun 2008. Namun pada tahun 1998 diputuskan oleh kelompok anggota ASEAN untuk mengajukan realisasi AFTA menjadi 1 Januari 2002.

Menurut laporan GATT pada bulan Juli 1992 mengenai perbandingan tarif tertimbang (*trade weighted*) rata-rata antarnegara ASEAN memperlihatkan tingginya tingkat proteksi dari tiga negara ASEAN (Thailand dengan 36,3%, Filipina 22,9%, dan Indonesia 20,3%). Sejak tahun 1998, tingkat proteksi ketiga negara tersebut hanya tinggal rata-rata 10% hingga 15% saja.

Dalam kaitan dengan penerapan CEPT sendiri, hanya Singapura yang langsung menerapkan pemberlakuan tarif hingga 0% atau bebas pajak impor hingga 98% dari total kelompok produk yang diimpor dari ASEAN. Sementara, negara-negara ASEAN lainnya memilih penerapan bertahap sesuai skema CEPT.

Indonesia menerapkan penurunan tarif efektif untuk produk di bawah 20% telah dimulai sejak 1 Januari 1993, sedangkan untuk 20% ke atas akan dimulai secara bertahap semenjak 1 Januari 1995 dan baru akan mencapai tarif efektif 0%-5% di atas tahun 2000.

Pada saat ini lebih dari 75% tarif MFN (*Most Favoured Nation*) di Indonesia sudah berkisar antara 0-10% sebagaimana Tabel 1.1. Dari data di Tabel 1.1 dapat diperoleh informasi bahwa untuk periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, tarif MFN untuk *simple average tariff* mengalami penurunan, demikian juga dengan produk pertanian, non pertanian selain minyak, dan produk minyak petroleum.

Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan Indonesia salah satunya adalah dengan pelaksanaan penurunan tingkat tarif. Struktur rata-rata tarif umum periode tahun 2005-2007 adalah sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Struktur rata-rata tarif umum/MFN Indonesia, 2005-2007

Kategori	Rata-rata tarif MFN (%)		
	2005	2006	2007
Total Rata2 Sederhana Tarif (<i>Simple Average Tariff</i>)	9,9	9,5	7,8
Produk-produk Pertanian	12,1	11,7	11,6
Produk Non-pertanian (kecuali minyak)	9,6	9,2	7,2
Minyak Petroleum	3,2	1,1	1,2

Sumber Data : Depkeu, Tim Tarif

Sejak tahun 2003 pemerintah Indonesia telah menjadwalkan penurunan tarif menjadi 0,0% dalam tahun 2010 untuk negara-negara anggota ASEAN. Dalam tahun 2005 dan 2006 rata-rata tarif CEPT ini mencapai 2,8% dan akan menurun mencapai 2,7% di tahun 2007. Dengan penurunan tarif bea masuk tersebut, nilai impor dari negara-negara ASEAN ke Indonesia mengalami kenaikan sebesar Rp12,1 triliun dan Rp21,9 triliun berturut-turut dalam tahun 2006 dan 2007 (Nota Keuangan 2008).

Demikian pula untuk ASEAN-China FTA, skema penurunan bea masuk untuk 90,0% produk-produk kategori *normal track* menjadi 0,0% sampai tahun 2010/2012 telah dimulai sejak tahun 2006. Penurunan tarif rata-rata Bea Masuk untuk tahun 2005 yang semula 9,6% menjadi 9,5% tahun 2006 ini, sehingga meningkatkan nilai impor dari China ke Indonesia dari Rp29,7 triliun dalam tahun 2005 menjadi Rp33,6 triliun dalam tahun 2006 (Nota Keuangan 2008).

Di sisi lain, ASEAN-Korea FTA mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2007, sehingga nilai impor dari Korea ke Indonesia diharapkan akan meningkat sebesar Rp1,7 triliun. Demikian pula dengan penerapan ASEAN-China FTA, nilai impor dari China diharapkan semakin meningkat dalam tahun 2007 menjadi sekitar Rp36,0 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp33,6 triliun (Nota Keuangan 2008).

Berdasarkan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2008, Nilai Impor, penerimaan Bea Masuk (BM), dan Tarif bea masuk rata-rata untuk tahun 2005-2007 sebagaimana Tabel 1.2 berikut;

Tabel 1.2
 Nilai Impor, Penerimaan Bea Masuk (BM), dan Tarif Rata-rata
 2005-2007 (triliun rupiah)

Negara	2005			2006			2007*		
	Nilai Impor	BM	Tarif rata-rata (%)**	Nilai Impor	BM	Tarif rata-rata (%)**	Nilai Impor	BM	Tarif rata-rata (%)**
ASEAN	142,2	3,8	2,8	154,3	3,2	2,8	176,2	4,5	2,7
Cina	29,7	1,3	9,6	33,6	1,6	9,5	36,0	1,7	6,2
Korea	14,7	0,5	9,9	12,6	0,4	9,5	14,3	0,4	6,6
Jepang***	65,0	2,2	9,9	49,2	1,4	9,5	51,8	0,7	7,8
Lainnya	308,2	7,0	9,9	310,7	5,5	9,5	297,0	7,1	7,8
Total	559,7	14,9	8,4	561,8	12,1	8,1	575,3	14,4	6,2

* APBN-P

** Tarif Rata-rata diperoleh dari perhitungan rata-rata sederhana (simple average tariff)

*** Economic Partnership Agreement (EPA) Indonesia-Jepang belum berlaku

Sumber: Departemen Keuangan dan BPS (diolah)

Untuk importasi dari negara ASEAN, pada kurun waktu tahun 2005-2007 tarif rata-rata mengalami penurunan, dan penerimaan bea masuk turun di tahun 2006 dan naik di tahun 2007. Sedangkan untuk nilai impor mengalami kenaikan di tahun 2006 dan tahun 2007. Pada importasi dari negara China tarif rata-rata mengalami penurunan. Penerimaan bea masuk dan nilai impor mengalami kenaikan di tahun 2006 dan tahun 2007.

Sedangkan importasi dari negara Korea, Jepang dan negara lainnya menunjukkan tarif rata-rata, penerimaan bea masuk dan nilai impor mengalami penurunan di tahun 2006 dan tahun 2007.

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui juga bahwa realisasi penerimaan bea masuk dalam tahun 2006 sebesar Rp12,1 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp2,8 triliun atau 18,6% dibandingkan dengan realisasi tahun 2005.

Hal tersebut disebabkan adanya penurunan tarif bea masuk yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi (*tariff protection*), peningkatan efisiensi industri dalam negeri (*incentive/industry assistance*), pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan internasional.

Pada tahun 2007 realisasi penerimaan bea masuk sebesar Rp14,4 triliun meningkat sebesar Rp2,3 triliun atau sebesar 18,8% dibandingkan dengan realisasi tahun 2006 sebesar Rp12,1 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume impor barang akibat membaiknya kondisi ekonomi dalam negeri, menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

Hal tersebut juga berkaitan dengan dampak dari pelaksanaan langkah-langkah penyempurnaan administrasi misalnya melalui pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang dilakukan bulan Juli 2007 di Tanjung Priok, program pengembangan *national single window*, dan perluasan jalur prioritas.

Berdasarkan data-data nilai impor, penerimaan bea masuk, dan tarif bea masuk rata-rata menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan liberalisasi perdagangan menyebabkan kecenderungan nilai impor naik, namun penerimaan bea masuk yang menurun.

Beberapa studi mengungkapkan bahwa dampak liberalisasi perdagangan dalam kawasan yang lebih sempit, yakni AFTA tidak akan menimbulkan efek positif secara signifikan terhadap perdagangan dan pendapatan negara-negara peserta.

Sedangkan menurut studi *Philippines Institute of Development Studies* tahun 1996, dengan diberlakukannya AFTA Indonesia juga akan mengalami defisit dalam neraca perdagangan dengan negara-negara Asia lainnya dengan ekspor diperkirakan naik 14,5%, sementara impor naik lebih tinggi, yakni 27%.

Perkembangan penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dalam kurun waktu tahun 2005-2007 serta persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dilihat pada Tabel 1.3 (Nota Keuangan, 2008).

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak perdagangan internasional hanya menyumbang sekitar 0.5% dari Produk Domestik Bruto. Penerimaan bea masuk untuk tahun 2006 mengalami penurunan, demikian juga dengan persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto.

Tabel 1.3
Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 2005-2007
(triliun rupiah)

Uraian	2005		2006		2007	
	Realisasi	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB	APBN-P	% thd PDB
I. Pajak Dalam Negeri	331,6	11,9	396,0	11,9	474,6	12,6
1. Pajak Penghasilan	175,5	6,3	208,8	6,3	251,7	6,7
a. migas	35,1	1,3	43,2	1,3	37,3	1,0
b. non migas	140,4	5,0	165,6	5,0	214,5	5,7
2. PPN dan PPnBM	101,3	3,6	123,0	3,7	152,1	4,0
3. PBB	16,2	0,6	20,9	0,6	22,0	0,6
4. BPHTB	3,4	0,1	3,2	0,1	4,0	0,1
5. Cukai	33,3	1,2	37,8	1,1	42,0	1,1
6. Pajak Lainnya	2,1	0,1	2,3	0,1	2,7	0,1
II. Pajak Perdagangan Internasional	15,2	0,5	13,2	0,4	17,5	0,5
1. Bea Masuk	14,9	0,5	12,1	0,4	14,4	0,4
2. Pajak/Pungutan Ekspor	0,3	0,0	1,1	0,0	3,0	0,1

Sumber Data : Departemen Keuangan RI

Keterangan : PDB Nominal dengan cakupan basis perhitungan tahun 2000

Sedangkan perkembangan target dan realisasi penerimaan Bea Masuk untuk periode tahun anggaran 1985-2007 serta persentase perubahan dari target dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk (Juta Rupiah)

Tahun Anggaran	Target	% Δ	Realisasi	% Δ	Pencapaian Target
1985	717.100,00	---	674.300,00	---	94,03
1986	956.618,00	33,40	1.269.300,00	88,24	132,69
1987	900.000,00	-5,92	1.441.500,00	13,57	160,17
1988	1.068.300,00	18,70	1.376.100,00	-4,54	128,81
1989	1.421.200,00	33,03	1.892.200,00	37,50	133,14
1990	1.971.800,00	38,74	2.799.800,00	47,97	141,99
1991	2.573.800,00	30,53	2.871.100,00	2,55	111,55
1992	2.652.200,00	3,05	3.223.300,00	12,27	121,53
1993	2.888.100,00	8,89	3.555.300,00	10,30	123,10
1994	3.208.000,00	11,08	3.900.100,00	9,70	121,57
1995	3.247.904,00	1,24	3.029.400,00	-22,33	93,27

1996	2.807.064,00	-13,57	2.925.830,20	-3,42	104,23
1997	3.321.700,00	18,33	3.231.565,48	10,45	97,29
1998	5.494.900,00	65,42	2.328.395,73	-27,95	42,37
1999	2.950.300,00	-46,31	4.020.959,49	72,69	136,29
2000	4.976.300,00	68,67	6.423.338,96	59,75	129,08
2001	10.398.100,00	108,95	9.097.127,21	41,63	87,49
2002	11.839.200,00	13,86	10.399.133,00	14,31	87,84
2003	11.332.600,00	8,99	10.847.262,07	4,31	95,72
2004	11.837.600,00	4,46	12.444.003,76	14,72	105,12
2005	16.590.500,00	46,40	14.920.655,70	19,90	89,93
2006	13.583.300,00	-18,13	12.141.649,38	-18,63	89,39
2007	14.417.600,00	6,14	16.672.469,14	37,32	115,64

Sumber data : Laporan Monitoring Pencapaian Target Penerimaan DJBC

1.2. Perumusan Masalah

Kecenderungan atau tendensi secara umum untuk negara berkembang adalah liberalisasi perdagangan akan berdampak negatif terhadap pajak perdagangan. Akan tetapi pengukuran reformasi perdagangan dan implikasinya terhadap penerimaan dapat berdampak positif, negatif dan netral, tergantung dari sumber hambatan dan karakteristik dari masing-masing negara. (Ebrill et al, 2002).

Dengan hasil beberapa studi dan data-data yang ada yang berkaitan dengan dampak liberalisasi, maka dampak kebijakan liberalisasi perdagangan dapat menaikkan atau menurunkan penerimaan bea masuk. Di dalam teori perubahan langsung dari penerimaan bea masuk akibat kebijakan liberalisasi perdagangan bersifat ambigu, tergantung faktor-faktor lain seperti produktifitas atau elastisitas penerimaan bea masuk (Matlanyane dan Harmse, 2000). Di dalam penelitian-penelitian yang sering digunakan adalah produktifitas penerimaan bea masuk terhadap Produk Domestik Bruto.

Beberapa studi yang dilakukan oleh IMF maupun World Bank pada umumnya menyatakan bahwa penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti; nilai impor (*import trade*), nilai tukar (*real effective exchange rate*), tarif rata-rata (*unweigghed average tariff rate*), dan juga variabel *dummy* liberalisasi perdagangan (*liberalization dummy*) (Dandapani Paudel, 2006).

Menurut IMF dan World Bank, kemungkinan pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan adalah sebagaimana Tabel 3.1.1. berikut:

Tabel 3.1.1.
Revenue Impact of Trade Liberalization

<i>Trade Reform</i>	<i>Expected Revenue Impact</i>
<i>Replace non-tariff barriers with tariffs</i>	<i>Positive</i>
<i>Eliminate tariff exemptions</i>	<i>Positive</i>
<i>Eliminate trade-related subsidy</i>	<i>Positive</i>
<i>Reduce tariff dispersion</i>	<i>Ambiguous / Positive</i>
<i>Eliminate state trading monopolies</i>	<i>Ambiguous / Positive</i>
<i>Reduce high average tariff</i>	<i>Ambiguous</i>
<i>Lower maximum tariff</i>	<i>Ambiguous</i>
<i>Reduce moderate or low average tariffs</i>	<i>Negative</i>
<i>Eliminate export taxes</i>	<i>Ambiguous / Negative</i>

Source : IMF and World Bank staff estimate (Ebrill et al, 2002)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terkait kebijakan liberalisasi perdagangan, dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. seberapa besar elastisitas penerimaan bea masuk terhadap Produk Domestik Bruto
- b. bagaimana pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan bea masuk

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian dan penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui produktifitas atau elastisitas dari penerimaan bea masuk terhadap Produk Domestik Bruto
- b. Untuk mengetahui pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan bea masuk

Sedangkan manfaat tesis ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di bidang liberalisasi perdagangan. Lebih khusus lagi untuk Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan bea masuk dan kebijakan-kebijakan bidang kepabeanan lainnya.

1.4. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, hasil-hasil penelitian yang dilakukan IMF dan Bank Dunia, serta data-data empiris tiga tahun terakhir terkait penerimaan bea masuk dan tarif bea masuk rata-rata yang cenderung menurun dengan adanya kebijakan liberalisasi perdagangan, maka hipotesis dari tesis adalah sebagai berikut:

- a. penerimaan bea masuk mempunyai elastisitas yang positif terhadap perubahan Produk Domestik Bruto
- b. liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penerimaan bea masuk

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup periode tahun 1970 sampai dengan tahun 2007. Pilihan atas periode waktu tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa ruang lingkup penelitian telah cukup untuk memenuhi persyaratan secara akademik.

Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa Laporan Harian Penerimaan Bea Masuk serta data sekunder lainnya yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Data-data tersebut meliputi penerimaan bea masuk, nilai impor, tarif bea masuk rata-rata, nilai tukar, Produk Domestik Bruto (PDB), dan kebijakan-kebijakan liberalisasi perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintah.

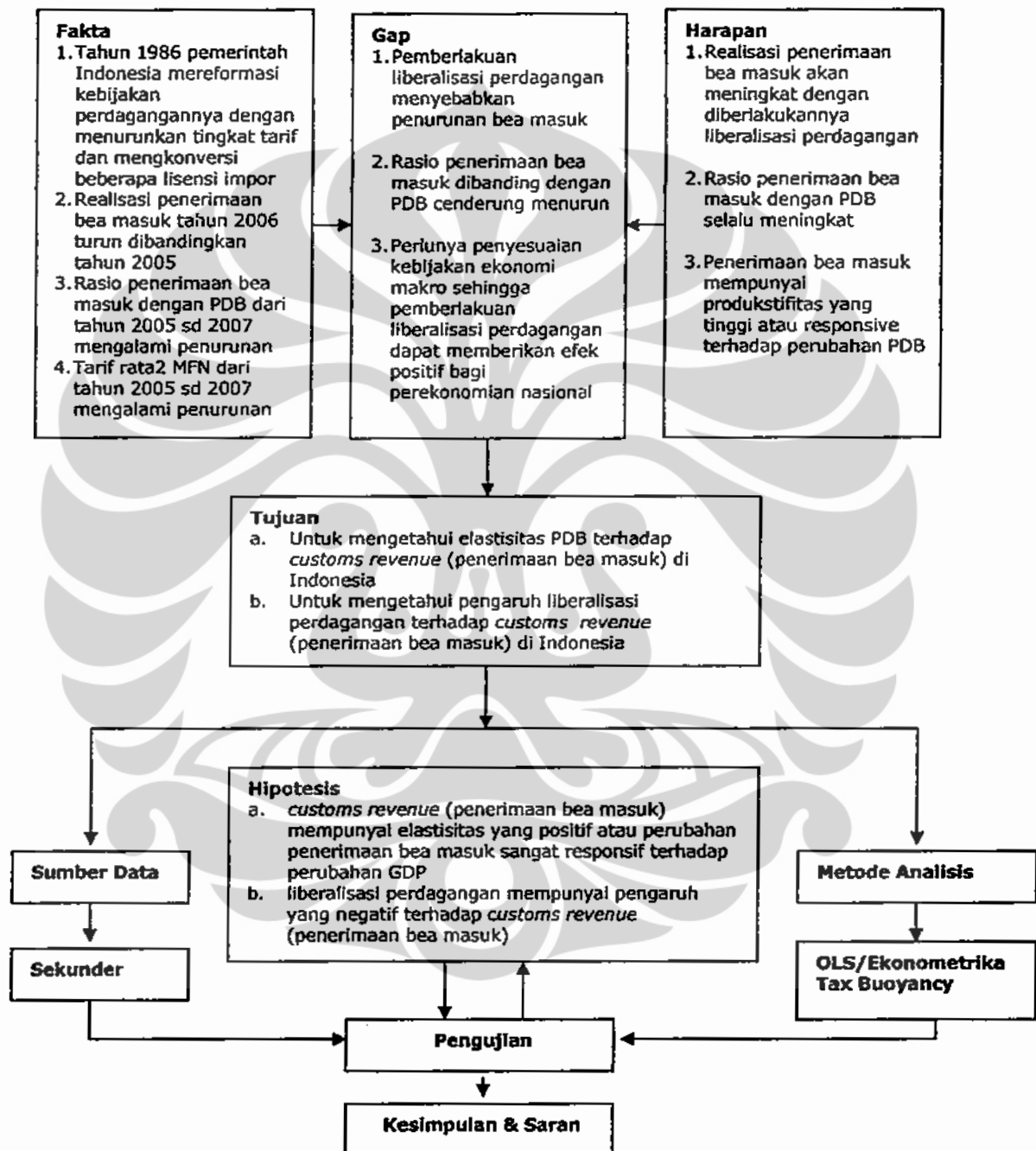
Disamping data-data yang bersifat kuantitatif, dalam penelitian juga digunakan variabel *dummy*. Untuk variabel *dummy* yang digunakan adalah pendekatan periodisasi *pre-liberalization* dan *post-liberalization*, adalah sebelum tahun 1986/1987 sebagai periode *pre-liberalization* dan setelah 1986/1987 sebagai periode *post-liberalization*.

1.6. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pemerintah menurunkan tarif bea masuk untuk barang-barang impor yang masuk dalam kategori bahan baku dan barang modal bertujuan untuk meningkatkan ekspor.

Dengan kata lain, peningkatan impor diharapkan akan diikuti oleh peningkatan Produk Domestik Bruto, karena diharapkan nilai ekspor akan lebih tinggi daripada nilai impornya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sejauh

mana perubahan dari Produk Domestik Bruto akan mengakibatkan perubahan pada penerimaan bea masuk. Secara umum kerangka berpikir yang melatarbelakangi dan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini, dapat dilihat pada diagram sebagai berikut;



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.7. Metodologi Penelitian

Analisis penelitian menggunakan pendekatan ekonometrika dengan metode estimasi *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengukur elastisitas Produk Domestik Bruto terhadap pajak perdagangan internasional (penerimaan bea masuk) dan pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan bea masuk.

Estimasi elastisitas penerimaan bea masuk dilakukan dengan mengadaptasi model (Osoro, 1993) serta (Matlanyane dan Harmse, 2000). Sedangkan estimasi pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan bea masuk dilakukan dengan mengadaptasi model (Ebrill et al, 1999; Paudel, 2006; dan Matlanyane-Harmse, 2000).

Penelitian mereka menyatakan bahwa penerimaan bea masuk (*trade revenue*) merupakan fungsi dari nilai impor (*import base*), nilai tukar (*exchange rate*), tarif bea masuk rata-rata (*average tariff rate*), dan *dummy variable* yang merepresentasikan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*).

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab. Bab pertama terdiri atas latar belakang, perumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesa, ruang lingkup penelitian, serta kerangka pemikiran dan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua memuat landasan teori tentang elastisitas, Produk Domestik Bruto, analisa ekonometrika dengan OLS, liberalisasi perdagangan, kebijakan-kebijakan liberalisasi perdagangan di Indonesia selama periode penelitian.

Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian mencakup model yang dijadikan sebagai referensi, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan data-data yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian berupa analisis kuantitatif hasil regresi, serta interpretasi model melalui analisa statistik maupun analisa ekonometrika, serta analisa dan pembahasan dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan serta efek ekonomi lainnya baik secara mikro maupun makro.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran kebijakan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional terdapat beberapa aliran pemikiran, dimulai dari pemikiran yang dikenal sebagai aliran merkantilisme. Aliran merkantilisme ini berpendapat bahwa perdagangan internasional akan terjadi apabila terdapat kesempatan memperoleh surplus neraca transaksi berjalan (*current account*).

Oleh karena itu, kegiatan ekspor-impor diletakkan sebagai lokomotif utama yang dipacu melalui peningkatan industri dalam negeri. Dari hasil ekspor inilah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan impor. Sehingga aliran merkantilisme menyetujui pemikiran bahwa kegiatan produksi dalam negeri dan ekspor harus ditingkatkan dengan memberikan rangsangan berupa subsidi dan fasilitas-fasilitas lain dari pemerintah (Hendro Halwani, 2005).

Adam Smith dalam bukunya yang terkenal, *The Wealth of Nation* (1776), menjelaskan bahwa perdagangan bebas (*free trade*) antarnegara akan membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut, jika salah satu negara tersebut tidak memaksakan untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan defisit neraca perdagangan dari mitra dagangnya.

Landasan teori perdagangan internasional lainnya yang melatarbelakangi terjadinya liberalisasi antara lain teori keunggulan komparatif dan teori *factor endowments*. David Ricardo menyempurnakan teori keunggulan absolut dari Adam Smith dengan mengemukakan teori keunggulan komparatif.

Teori keunggulan komparatif menyatakan dalam keadaan *free trade*, apabila salah satu negara kurang efisien dibandingkan negara lainnya dalam memproduksi kedua barang tersebut, kedua negara masih dimungkinkan melakukan perdagangan dan menguntungkan kedua belah pihak. Negara yang pertama harus melakukan spesialisasi dalam produksi

komoditas yang *absolute disadvantage*-nya lebih kecil (komoditas inilah yang disebut sebagai keunggulan komparatifnya) dan mengimpor komoditas yang *absolute disadvantage*-nya lebih besar (komoditas ini sebagai ketidakunggulan komparatifnya) (Salvatore,2004).

Heckser-Ohlin (H-O) mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan *endowment*. Perbedaan *opportunity cost* suatu produk antara suatu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) masing-masing negara. Perbedaan tersebut menimbulkan terjadinya perdagangan internasional.

Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif lebih banyak dan murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya (Salvatore,2004).

Proteksi secara umum ditujukan sebagai tindakan untuk melindungi produksi dalam negeri terhadap persaingan barang impor di pasaran dalam negeri. Metode proteksi yang dilakukan menyangkut sistem pungutan tarif (pajak) terhadap barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dimana tarif merupakan pajak yang dikenakan atas barang impor.

Secara umum pengenaan tarif mempunyai pengaruh terhadap produksi, konsumsi, penerimaan, distribusi pendapatan, persaingan, dan pendapatan pemerintah dan neraca pembayaran. Dengan pengenaan tarif akan menaikkan output barang yang diproteksi dan meningkatkan biaya yang seharusnya dipotong dalam output barang yang tidak diproteksi.

Hal ini menunjukkan ketidakefisienan yang disebabkan oleh pengenaan tarif. Alasan tersebut di atas dapat dipegang sebagai aspek positif tarif, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap sama, sehingga aspek positif adanya perdagangan bebas adalah menekan, bahkan menghilangkan produksi yang tidak efisien.

2.1.2. Elastisitas

Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi kemakmuran.

Elastisitas dapat mengukur seberapa besar perubahan suatu variabel terhadap perubahan variabel lain atau angka elastisitas (koefisien elastisitas) adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah, sebagai reaksi karena satu variabel lain (variabel bebas) berubah satu persen (Manurung, 2002).

Atau secara umum, elastisitas "y terhadap x" adalah:

$$E_{x,y} = \left| \frac{\partial \ln x}{\partial \ln y} \right| = \left| \frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{y}{x} \right|$$

Elastisitas biasa disimbolkan sebagai 'E', 'e' atau epsilon kecil, 'ε'. Untuk memudahkan pemahaman terhadap konsep tersebut, berikut ini akan dibahas salah satu jenis elastisitas, yaitu elastisitas penghasilan (*Income Elasticity of Demand*).

Permintaan (pembelian) suatu barang atau jasa oleh konsumen dipengaruhi oleh perubahan penghasilan konsumen yang bersangkutan, baik dalam pengertian nominal maupun riil. Suatu konsep untuk mengukur derajat responsivitas perubahan permintaan terhadap adanya perubahan penghasilan adalah elastisitas penghasilan. Dalam kasus sederhana, fungsi permintaan dapat dinotasikan sebagai berikut.

$$Q = f(P, I)$$

Keterangan:

Q : fungsi permintaan

P : tingkat harga

I : penghasilan konsumen

Dalam konsep elastisitas penghasilan, asumsi bahwa penghasilan konsumen konstan dihilangkan. Oleh karena itu, elastisitas penghasilan merupakan tingkat perubahan relatif dari jumlah barang yang diminta konsumen karena adanya perubahan penghasilan. Elastisitas penghasilan

dapat didefinisikan sebagai derajat sensitivitas perubahan permintaan sebagai akibat dari perubahan penghasilan seorang konsumen.

Secara matematis, elastisitas penghasilan didefinisikan sebagai persentase perubahan dalam jumlah barang yang diminta (Q_x) dibagi dengan persentase perubahan dalam penghasilan (I).

Pada dasarnya terdapat tiga macam elastisitas penghasilan, yaitu: elastisitas positif, negatif, dan nol. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat disimak sebagai berikut.

1. Elastisitas penghasilan yang bernilai positif dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - (a) Elastisitas penghasilan uniter yaitu ketika peningkatan dalam penghasilan direspon oleh konsumen dengan peningkatan permintaan secara proporsional. Perubahan permintaan yang positif akan memberikan elastisitas penghasilan yang positif pula. Dalam hal ini elastisitas sama dengan satu ($E = 1$). Sebagai contoh jika penghasilan konsumen meningkat sebesar 50% maka akan diimbangi dengan peningkatan permintaan sebesar 50%.
 - (b) Elastisitas penghasilan inelastis yaitu jika perubahan penghasilan sebesar 1% menyebabkan perubahan permintaan kurang dari 1%. Secara matematis, koefisien elastisitas penghasilan inelastis bernilai kurang dari 1 tetapi positif ($0 < E < 1$).
 - (c) Elastisitas penghasilan dikatakan elastis jika perubahan penghasilan sebesar 1% menyebabkan perubahan permintaan lebih dari 1%. Nilai elastisitas penghasilan tipe ini lebih dari satu ($E > 1$).
2. Elastisitas penghasilan yang bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa kenaikan jumlah penghasilan justru mengakibatkan permintaan terhadap suatu barang menurun.
3. Elastisitas penghasilan bernilai nol. Ketika penghasilan meningkat, jumlah barang yang diminta tidak mengalami perubahan. Berapa pun perubahan penghasilan tidak akan merubah permintaan (konsumsi) barang tersebut.

Berdasarkan besarnya koefisien elastisitas penghasilan, suatu barang dapat dikelompokkan ke dalam barang mewah, barang normal, atau barang inferior sebagaimana Tabel 2.1.2.1..

Tabel 2.1.2.1
Interpretasi Elastisitas Penghasilan

Nilai Elastisitas	Sebutan	Akibat Kenaikan harga	Akibat Penurunan harga
$E < 0$	Barang Inferior	Jumlah diminta Menurun	Jumlah diminta naik
$0 < E < 1$	Barang Normal	Jumlah diminta naik dengan persentase lebih rendah	Jumlah diminta menurun dengan persentase lebih rendah
$E > 1$	Barang Mewah	Jumlah diminta naik dengan persentase lebih tinggi	Jumlah diminta menurun dengan persentase lebih tinggi

2.1.3. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut (Manurung, 2002)

Tercakup dalam definisi diatas adalah pertama, produk dan jasa akhir, dalam pengertian barang dan jasa yang dihitung dalam PDB adalah barang dan jasa yang digunakan pemakai akhir (untuk konsumsi). Kedua, harga pasar, yang menunjukkan bahwa nilai output nasional tersebut dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada periode yang bersangkutan. Ketiga, faktor-faktor produksi yang berlokasi di negara yang bersangkutan, dalam arti penghitungan PDB tidak mempertimbangkan asal faktor produksi (milik perekonomian atau milik asing) yang digunakan dalam menghasilkan output.

PDB berbeda dari Produk Nasional Bruto (PNB) karena PDB memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan. Sehingga PNB adalah PDB ditambah pendapatan faktor produksi dalam negeri dan dikurangi pendapatan faktor produksi luar negeri.

PDB Nominal atau disebut PDB Atas Dasar Harga Berlaku merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga atau inflasi. Sedangkan PDB riil atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga atau inflasi.

Dengan PDB nominal dan PDB riil dapat juga diperoleh suatu indeks harga (deflator PDB) yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Dimana deflator PDB adalah angka yang diperoleh dari hasil PDB nominal dibagi PDB riil dan hasilnya dikalikan bilangan 100. Untuk menghitung inflasi yaitu deflator tahun ke-t dikurangi deflator tahun ke t-1 dan hasilnya dibagi dengan deflator tahun ke t-1 yang selanjutnya hasil pembagian dikalikan 100%. Penghitungan deflator juga dapat diperoleh dengan menghitung harga tahun ke-t dibagi harga tahun ke t-1 dan hasil perkalian dikalikan 100%.

Pendapatan Nasional dapat dihitung dengan memakai tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Menurut pendekatan produksi, Pendapatan Nasional adalah total produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, dimana yang dijumlahkan adalah nilai tambah (*value added*) masing-masing sektor perekonomian. Dalam hal ini yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dengan nilai input antara. Penghitungan dengan nilai tambah dilakukan untuk menghindari *double* atau *multiple counting*. Hasil penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi sering disebut Produk Domestik Bruto.

Sedangkan rumus umum untuk Pendapatan Nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$\text{Pendapatan Nasional} = [\text{konsumsi}] + [\text{investasi}] \\ + [\text{pengeluaran pemerintah}] + [\text{ekspor}] - [\text{impor}]$$

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri. Hasil penghitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran sering disebut Produk Nasional Bruto.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:

$$\text{Pendapatan Nasional} = [\text{sewa}] + [\text{upah}] + [\text{bunga}] + [\text{laba}]$$

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha (*skill* atau *entrepreneurships*). Secara teori, Pendapatan Nasional dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung Pendapatan Nasional dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

2.1.4. Analisis Ekonometrika dengan Metode Kuadrat Terkecil (Ordinary Least Squares/OLS)

Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan, penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, dan penelitian eksperimental. Dimana penelitian korelasional berusaha untuk menentukan apakah terdapat hubungan (asosiasi) antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel yang diteliti. Berbeda dengan korelasi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, studi kausalitas juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, studi kausalitas mempertanyakan masalah sebab akibat (Mudrajad Kuncoro, Ph.D:2003).

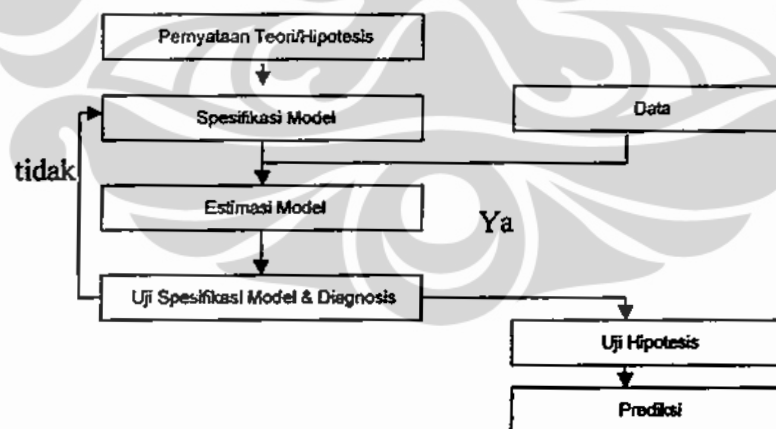
Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ekonometrika. Ekonometrika sebagai alat pengukuran di dalam ekonomi mempunyai dua metode, yaitu metodologi klasik dengan pendekatan *bottom up* atau *specific to general* dan metodologi modern dengan pendekatan *top down* atau *general to specific* (Agus Widarjono, 2007).

Aliran metodologi modern dengan pendekatan *top down* atau *general to specific* dipelopori oleh Hendry dan Richard sejak dekade 1980. Sebagaimana metodologi klasik, pekerjaan ekonometrika dimulai dari pernyataan teori atau hipotesis.

Langkah berikutnya membuat spesifikasi model dan melakukan estimasi model yang kita bangun. Namun setelah melakukan estimasi model kita tidak langsung melakukan verifikasi hasil regresi, tetapi melakukan uji spesifikasi model dan diagnosis (*modeling*) terlebih dahulu.

Langkah ini diperlukan untuk membuktikan apakah model yang kita bangun sudah tepat atau tidak bias lagi. Jika model sudah tepat maka kita bisa membuat generalisasi melalui uji statistik. Selanjutnya hasil estimasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau peramalan.

Diagram metodologi ini dapat digambarkan sebagai berikut (Agus Widarjono, 2007):



Gambar 2. Metodologi Ekonometrika Modern

Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan (*error*) setiap observasi terhadap garis regresi tersebut. Tujuan utama regresi adalah mengestimasi

fungsi regresi populasi berdasarkan fungsi regresi sampel (Agus Widarjono, 2007).

Asumsi utama yang mendasari model regresi dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut (Mudrajad Kuncoro, Ph.D:2003);

- a. Model regresi linier, artinya: linier dalam parameter
- b. Variabel X diasumsikan nonstokastik, artinya: nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang
- c. Nilai rata-rata variabel gangguan adalah nol
- d. Homoskedastisitas, artinya varians variabel gangguan sama untuk setiap periode
- e. Tidak ada otokorelasi antar variabel gangguan
- f. Antara variabel gangguan dan variabel X saling bebas, sehingga kovarian adalah nol
- g. Model regresi telah dispesifikasi secara benar

Menurut Teorema Gauss-Markov, setiap estimator OLS harus memenuhi kriteria BLUE, yaitu (Gujarati, 1995):

- a. *Best*, yaitu yang terbaik
- b. *Linear*, yaitu merupakan kombinasi linear dari data sampel
- c. *Unbiased*, yaitu nilai rata-rata atau nilai harapan harus sama dengan nilai yang sebenarnya
- d. *Efficient estimator*, yaitu memiliki varian yang minimum

Sebuah model yang dipilih untuk analisis harus dilakukan uji spesifikasi model dan diagnosis model dengan meneliti beberapa kriteria berikut ini (Agus Widarjono:2007):

- a. Prediksi yang dibuat dari model harus masuk nalar
- b. Harus konsisten dengan teori
- c. Mempunyai variabel independen yang tidak berkorelasi dengan variabel gangguan
- d. Menunjukkan adanya konsistensi parameter
- e. Menunjukkan data yang koheren
- f. Model harus komplit yaitu mencakup semua model yang sudah ada (*rival models*)

Sedangkan lima kesalahan spesifikasi model yaitu;

1. Mengeluarkan variabel independen yang tidak relevan
2. Memasukkan variabel independen yang tidak relevan
3. Menggunakan bentuk fungsi model yang salah
4. Kesalahan pengukuran
5. Spesifikasi yang salah tentang variabel gangguan

Kesalahan spesifikasi nomor 1 sampai dengan nomor 4 dikenal dengan kesalahan spesifikasi model (*model specification errors*). Dalam hal ini kita mengetahui model yang benar tetapi tidak mengestimasi model yang benar. Sedangkan kesalahan spesifikasi nomor 5 muncul karena kita tidak mengetahui model mana yang benar (*model mis-specification errors*).

2.2. Liberalisasi Perdagangan dan Organisasi Perdagangan Dunia

Pada tanggal 15 April 1994, para menteri perdagangan di Marrakesh, Maroko, menandatangani akta final Putaran Uruguay dan menyetujui pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Dan tanggal 8 Desember 1994, disepakati bahwa WTO mulai beroperasi 1 Januari 1995. Badan ini menggantikan dan melanjutkan hampir 50 tahun pekerjaan dari “lembaga interim” yaitu *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT).

Tujuan dasar dari kedua organisasi tersebut adalah mendorong dan menaikkan kerjasama ekonomi internasional untuk memperkuat ekonomi global melalui perdagangan yang lebih efisien dan *predictable* (jelas) bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan di dalam penanaman modal, lapangan kerja, dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat.

Pada awalnya GATT diciptakan sebagai suatu bagian dari upaya penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan yang ada dalam perdagangan, baik hambatan yang berupa bea masuk (*tariff barrier*), maupun hambatan lainnya (*non-tariff barrier*).

GATT sebagai sistem aturan permainan untuk menjamin kelancaran perdagangan internasional yang terbuka berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut (HS Kartadjoemena:1997):

- 1) *Most Favoured Nation*, apabila suatu negara anggota memberikan konsesi kepada suatu negara anggota lainnya, maka konsesi tersebut harus diberikan kepada negara anggota lain tanpa diskriminasi
- 2) *National Treatment*, suatu produk/barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberikan perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri
- 3) *Transparency*, semua ketentuan yang dikeluarkan oleh suatu negara anggota yang menyangkut perdagangan internasional harus dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh negara anggota lainnya
- 4) *Elimination of Quantitative Restrictions*, setiap negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan impor atau ekspor melalui kuota atau lisensi. Hambatan hanya diperbolehkan melalui tarif, pajak atau sejenisnya
- 5) *Restriction to Safeguard the BOP*, untuk melindungi kesulitan serius dalam neraca pembayaran, suatu negara anggota diperbolehkan melakukan pembatasan kuantitatif (jumlah atau nilai) barang yang diimpor dengan persyaratan-persyaratan tertentu
- 6) *Special and Differential Treatment*, pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu, negara-negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negoisasinya dengan negara-negara berkembang dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.

Di dalam perundingan-perundingan GATT, perundingan di bidang tarif merupakan bagian yang paling lama ditangani oleh GATT. Faktor utama yang menyebabkan sulitnya penurunan tingkat tarif antara lain adalah hal-hal sebagai berikut (HS Kartadjoemena:1997):

- 1) Jenis tarif yang belum diturunkan oleh negara-negara maju adalah tarif bagi jenis produk yang secara politis cukup sensitif, seperti tekstil. Tarif impor produk semacam ini sulit untuk diturunkan

- 2) Negara-negara maju berpendapat bahwa pada masa lalu negara berkembang telah banyak memperoleh *special leniency*. Oleh karena itu, kini negara berkembang juga diwajibkan memberikan kontribusi dalam hal *cuts and bindings* atau penurunan tarif yang diterapkan secara mengikat
- 3) Pada sebagian negara maju maupun sebagian negara berkembang, terdapat produk-produk yang tingkat tarifnya belum dikenakan *binding*

Kebijakan perdagangan lain yang penting adalah pengurangan-pengurangan tarif antar negara dalam suatu kawasan yang dimulai Mei 1995 hingga berakhir tahun 2003. Deregulasi perdagangan serentak dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya, terutama Malaysia dan Thailand. Selain itu periode ini juga ditandai oleh banyaknya prakarsa liberalisasi perdagangan baik ditingkat sub-regional, regional dan multilateral seperti CEPT-AFTA, KTT di Bogor dan Putaran Uruguay (ISEI, 2005).

Dalam suatu *Free Trade Area* para pesertanya sepakat untuk saling menurunkan tarif perdagangan di antara sesama peserta. Dalam AFTA, tarif itu disebut *AFTA preferential tariff* atau disingkat *AFTA tariff*, tetapi juga disebut sebagai *Common Effective Preferential Tariffs (CEPT)*.

Dalam pelaksanaan pemotongan tarif ditentukan peraturan sebagai berikut:

- a. Untuk produk yang sekarang tarifnya di atas 20% dilakukan pemotongan selama 5-8 tahun, sejak 1 Januari 1993. Cara pemotongan tarif dianjurkan dengan menggunakan rumus $(X-20\% \text{ dibagi } 5 \text{ atau } 8 \text{ tahun, dimana } X \text{ adalah besarnya tarif sekarang})$
- b. Untuk produk yang sekarang tarifnya 20% atau lebih rendah akan dikenakan pemotongan tarif selama 7 tahun. Besarnya pemotongan tarif minimum 5% dari kuantum untuk setiap pemotongan. Jadi, kalau sekarang tarifnya 20%, setiap tahun besarnya pemotongan minimum adalah 5% dari 20%, yaitu 1%
- c. Dua negara atau lebih dapat melakukan pemotongan tarif lebih cepat untuk produk yang tarifnya pada 1 Januari 1993 sebesar 20% atau lebih rendah. Seluruh pelaksanaan program penurunan tarif itu harus diumumkan kepada semua negara ASEAN

Menurut CEPT, dalam jangka waktu 15 tahun mendatang, waktu diberlakukannya pasar bebas ASEAN telah harus terjadi penurunan tarif produk sehingga mencapai 0-5% terhadap produk-produk manufaktur barang-barang modal, produk hasil pertanian yang diproses serta produk-produk lain yang tidak termasuk definisi produk-produk pertanian.

Penurunan tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, penurunan tingkat tarif yang sedang berlaku menjadi 20% dilakukan dalam jangka waktu 5-8 tahun yang dimulai 1 Januari 1993. Tahap kedua, penurunan tarif dari 20% menjadi 0-5% akan dilakukan dalam tempo 7 tahun dan dimulai tahun 2000.

Yang dimaksud dengan konsesi tarif CEPT-AFTA adalah berupa tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum (MFN), yang akan diperoleh eksportir apabila mengekspor suatu produk dari suatu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya.

Sedangkan syarat suatu produk dapat memperoleh konsesi CEPT adalah sebagai berikut:

- a. Produk yang bersangkutan harus sudah masuk dalam *Inclusion List* dari negara eksportir maupun importir
- b. Produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif yang disetujui oleh Dewan AFTA (AFTA Council)
- c. Produk tersebut harus memenuhi persyaratan kandungan lokal 40%

Dalam KTT Informal ASEAN III para kepala negara menyetujui usulan dari Singapura untuk menghapuskan semua bea masuk pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk negara-negara baru ASEAN. Selanjutnya dalam KTT ASEAN-China tahun 2001, telah di sepakati pembentukan *ASEAN-China Free Trade Area* dalam waktu 10 tahun.

Sementara itu dalam pertemuan kepala negara/pemerintah ASEAN tanggal 15-16 Desember 1998, mengumumkan keputusan untuk mempercepat pelaksanaan area perdagangan bebas ASEAN (AFTA) secara cepat menurunkan tarif dari produk-produknya. Kesepakatan yang dituangkan dalam pernyataan tentang langkah-langkah terobosan (*bold measure*) disebutkan bahwa pemimpin ASEAN sepakat, keenam negara inti ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand) penandatanganan pertama skema CEPT bagi pelaksanaan AFTA untuk mempercepat satu tahun pelaksanaan AFTA secara penuh dari tahun 2003 menjadi tahun 2002.

Sejak 1 Januari 2003, sebanyak 99,55% dari total tarif (44.361 tarif) enam negara pertama penandatanganan AFTA yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunai Darussalam telah diturunkan menjadi 0-5%, sedangkan produk-produk yang masih mempunyai tarif di atas 5% hanya merupakan produk sensitif dan di luar dari daftar penurunan tarif rata-rata penurunan tarif dari enam negara tersebut telah turun menjadi 2,39% dari 12,76% ketika penurunan tarif dimulai tahun 1993.

Untuk menjamin keberhasilan AFTA, negara-negara ASEAN tidak cukup hanya berusaha dengan menurunkan tarif, karena AFTA lebih merupakan kerjasama politik daripada kerjasama ekonomi. Beberapa permasalahan yang sering menjadi penghambat perwujudan AFTA, yaitu:

- a. Prosedur birokrasi yang berlebihan, baik di dalam ASEAN maupun dalam negara masing-masing. Adanya *red tape* birokrat menyebabkan persetujuan beberapa elemen dalam AFTA tertunda
- b. Kurang kuatnya perjanjian negara-negara anggota terhadap skema di dalam AFTA
- c. Kurang dilibatkannya sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan tingkat kawasan
- d. Kurangnya kemauan politik untuk mewujudkan kerjasama ekonomi di dalam ASEAN, karena selama ini perhatian para pemimpin negara lebih tersita pada kekhawatiran terhadap sektor-sektor yang akan dirugikan daripada manfaat ekonomi yang dapat diciptakan

2.3. Kebijakan Liberalisasi Perdagangan di Indonesia

Kebijakan perdagangan Indonesia mengalami masa-masa proteksi dan juga masa liberalisasi. Pada awal 1970-an sampai awal 1980-an, tingkat proteksi di Indonesia masih cukup tinggi. Reformasi kebijakan terutama terjadi pada tahun pertengahan dekade 1980-an.

Paket kebijakan perdagangan lainnya dikeluarkan pada bulan Oktober 1986 dan Januari 1987. Kebijakan ini berisi pencabutan pembatasan kuantitatif impor dan digantikan dengan mengenakan tarif impor. Kebijakan tentang penyederhanaan sistem alokasi quota tekstil dikeluarkan pada bulan Juni 1987. Paket Kebijakan November 1988 tentang penghapusan monopoli impor plastik dan baja, deregulasi pelayaran, diizinkan investor asing dalam hal distribusi barang.

Offer Indonesia yang pada tahap-tahap awal diserahkan masih belum menghasilkan penurunan tingkat tarif sebesar 30% dari tingkat semula. Sebagai langkah awal, untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif, Indonesia telah melakukannya dengan menyampaikan *offer* sebanyak 970 item tarif secara *unilaterall/autonomous liberalization*; sedangkan untuk perluasan *binding*, Indonesia telah menyampaikan offer sebanyak 1535 item tarif dengan *binding at previous rate*.

Offer "interim" Indonesia, setelah diadakan perluasan secara bertahap, terdiri dari sekitar 2000 lebih item tarif menurut klasifikasi *harmonized system* atau *HS tariff lines*. Dari sejumlah 2319 item yang telah masuk dalam Paket Kebijakan 28 Mei 1990 itu, sebanyak 1535 item tarif atau 66,19%, sudah dikenakan *binding* walaupun pada tingkat *previous rate* dan sebagian ditingkatkan lebih tinggi dari *base rate*-nya (*binding at previous rate*) dengan perincian;

- 1) produk manufaktur 1185 *HS tariff lines*
- 2) produk pertanian 202 *HS tariff lines*
- 3) produk perikanan 74 *HS tariff lines*
- 4) produk tekstil 617 *HS tariff lines*

Pada tahap paling akhir dalam negosiasi di bidang tarif, secara berangsur, akhirnya Indonesia mencapai keputusan untuk menentukan *offer* yang dikemukakannya dalam bentuk yang lebih integratif dan tidak lagi semata-mata bersikap reaktif terhadap permintaan negara maju. Prinsip utama adalah menentukan berapa rata-rata tarif yang dianggap aman bagi Indonesia apabila tingkat tersebut diterapkan secara umum sebagai komitmen yang bersifat *binding* dan tidak dapat diubah tanpa kompensasi terhadap negara lain.

Pendekatan prinsip yang ditentukan tersebut akhirnya dapat diterapkan secara konkret dengan komitmen sebagai berikut:

- 1) Indonesia menerapkan komitmen *binding* pada tingkat tarif maksimal 40% dan berlaku untuk sekitar 95% dari barang yang diimpor, dan yang mencakup sekitar 92% dari nilai impor
- 2) Bagi impor hasil pertanian, Indonesia sesuai ketentuan dalam perjanjian di bidang pertanian, menerapkan komitmen *binding* terhadap impor pertanian. Tingkat tarif pertanian lebih tinggi daripada manufaktur karena terdapat hasil pertanian yang semula diberi proteksi melalui ketentuan nontarif yang harus dikonversikan kepada tarif dalam rangka tarififikasi.

- 3) Komitmen untuk menghapus semua *non-tariff barriers* serta menghapus *import surcharge* dalam waktu 10 tahun

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada Mei 1990, dan Juni 1991 adalah kebijakan pelengkap dari berbagai reformasi yang dilaksanakan pada periode ini. Sementara itu, cakupan non-tarif mulai menurun dari 43% dari nilai impor pertengahan tahun 1986 menjadi sekitar 13% lima tahun kemudian.

Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan AFTA diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 645/KMK.01/1994 tanggal 29 Desember 1994 sebagai pelaksanaan dari *Agreement on CEPT for AFTA*
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 358/KMK.05/1996 tanggal 27 Mei 1996 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Importasi Barang Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK.01/1997 tanggal 28 Februari 1997 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Importasi Barang Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* Untuk Periode 1 Januari 1997 Sampai Dengan 31 Desember 2003
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 150/KMK.01/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Importasi Barang Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* Untuk Periode 1 Januari 2001 Sampai Dengan 31 Desember 2003
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 392/KMK.01/2003 tanggal 9 September 2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Importasi Barang Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* Untuk Periode 1 Mei 2003 Sampai Dengan 31 Desember 2003
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 546/KMK.01/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Importasi Barang Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*, berlaku sejak 1 Januari 2004

- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 28/PMK.010/2005 tanggal 18 Mei 2005 tentang Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Importasi Barang Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), berlaku sejak 18 Mei 2005

Sedangkan kebijakan-kebijakan deregulasi perdagangan lainnya yang pernah diberlakukan pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut (Hendro Halwani, 2005):

- 1) Paket Kebijakan 6 Mei 1986
Dikeluarkannya paket kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dan mengurangi hambatan yang menyebabkan kurangnya minat investor. Kebijakan ini meliputi kemudahan tataniaga ekspor non migas, fasilitas pengembalian bea masuk, fasilitas pembebasan bea masuk, dan pemberlakuan kawasan berikat
- 2) Paket Kebijakan 25 Oktober 1986
Kebijakan ini adalah dalam rangka menurunkan biaya produksi dengan menurunkan biaya produksi dengan menurunkan bea masuk sejumlah komoditi, perlindungan produksi dalam negeri melalui sistem tarif, pemberian fasilitas *swap* yang baru, dan kebijakan penanaman modal.
- 3) Paket kebijakan 15 Januari 1987
Paket kebijakan ini untuk meningkatkan kelancaran penyediaan barang keperluan produksi dan perlindungan industri dalam negeri secara lebih efisien dengan mengubah kebijakan non-tarif menjadi tarif untuk sejumlah komoditas tertentu
- 4) Paket Kebijakan 24 Desember 1987
Paket kebijakan ini berisikan tentang dibukanya mobilisasi dana pada pasar uang, untuk memperlancar perijinan di bidang produksi, jasa, dan investasi pada umumnya, serta untuk memperlancar arus ekspor dan impor
- 5) Paket Kebijakan 21 November 1988
Paket kebijakan ini menyangkut tentang peniadaan tataniaga impor untuk bahan-bahan plastik dan perlindungan industri dalam negeri dilakukan melalui tarif, dan sebagian besar impor produk-produk industri besi dan baja tidak ditata lagi, barang-barang yang sebelumnya kena larangan impor, maka perlindungannya dilakukan melalui penetapan tarif

- 6) **Paket Kebijakan 28 Mei 1990**
Paket kebijakan ini menetapkan penggantian proteksi melalui tataniaga impor menjadi proteksi melalui tarif bea masuk yang ditujukan untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing produk industri nasional
- 7) **Paket Kebijakan 6 Juli 1992**
Dalam paket kebijakan ini, pemerintah melonggarkan tataniaga impor, sehingga setiap produsen bisa melakukan impor langsung tanpa memerlukan lagi rekomendasi dari Departemen Perindustrian
- 8) **Paket Kebijakan 10 Juni 1993 dan Paket Kebijakan dan Debirokratisasi 23 Oktober 1993**
Paket kebijakan ini mencakup deregulasi di bidang otomotif, bidang ekspor/impor, bidang penanaman modal dan perijinan usaha, dan bidang farmasi
- 9) **Paket Kebijakan 19 Mei 1994**
Pemerintah mengeluarkan langkah deregulasi yang meliputi penyempurnaan bea masuk dan bea masuk tambahan, termasuk penghapusan harga normal, penghapusan tataniaga impor 27 pos tarif, dan penyempurnaan peraturan untuk kawasan berikat dan entrepot produksi tujuan ekspor
- 10) **Paket Kebijakan 23 Mei 1995**
Pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang mencakup lima bidang, meliputi tarif bea masuk dan bea masuk tambahan, tata niaga impor, entrepot produksi tujuan ekspor (EPTE)/kawasan berikat, penanaman modal dan perijinan, serta restrukturisasi usaha. Dalam deregulasi bidang tarif bea masuk dan bea masuk tambahan, dari sejumlah 9.398 pos tarif yang diturunkan bea masuknya sebanyak 6.030 pos atau 64,16%. Sebagian besar dari sisanya sudah mencapai tarif 0-5%. Berbeda dengan deregulasi sebelumnya, dalam deregulasi ini ditetapkan penurunan dengan jadwal tertentu. Hal ini agar lebih memberikan kepastian usaha dan sekaligus menampung komitmen AFTA, GATT/WTO dan kesepakatan dalam kerangka APEC. Jadwal tersebut adalah tarif bea masuk yang keseluruhannya 20% atau kurang, diturunkan secara bertahap sehingga menjadi setinggi-tingginya 20% pada tahun 1998 dan 10% pada tahun 2003. Dan tarif bea masuk yang keseluruhannya lebih dari 20% diturunkan secara

bertahap sehingga menjadi setinggi-tingginya 20% pada tahun 1998 dan 10% pada tahun 2003.

11) Paket Kebijakan 3 November 1997

Paket kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian, yang bertujuan menaikkan daya saing di pasar global. Pemerintah menghapus tataniaga impor kedelai, bawang putih dan gandum, namun dikenakan bea masuk yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1998. Pemerintah juga mengeluarkan jadwal penurunan bea masuk atas beberapa produk perikanan, produk kimia, dan logam.

12) Paket Kebijakan Insentif Perpajakan November 1999

Pemerintah menerapkan berbagai insentif perpajakan dan penghapusan disinsentif bagi proyek-proyek penanaman modal yang menghadapi masalah akibat krisis ekonomi. Program insentif ini merupakan insentif perpajakan untuk para investor yang paling dulu menanamkan modal di Indonesia. Insentif tersebut berupa pembebasan pajak (*tax holiday*), yang berlaku sampai 31 Maret 2000. Kemudian *tax allowance/tax deduction* yang diberlakukan mulai tanggal 1 April 2000.

13) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF)

Salah satu rencana tindak dalam paket kebijakan ekonomi tersebut adalah penyederhanaan prosedur dan fasilitas ekspor dan impor dengan melaksanakan harmonisasi tarif komoditi impor (termasuk komoditi pertanian) sesuai dengan perubahan daya saing

14) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.01/2004 tentang *Early Harvest Package ASEAN-China*

Dalam rangka kerjasama perdagangan ASEAN-China disepakati penurunan tarif bea masuk secara bertahap dalam tiga kategori; yaitu *Early Harvest Package*, *Normal Track*, dan *Sensitive Track*.

15) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang *Early Harvest Package Bilateral Indonesia-China*

Program penurunan tarif bea masuk AC_FTA diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 0% pada tahun 2006 yang berlaku baik di Indonesia maupun China mulai tanggal 1 Januari 2004.

- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 591/PMK.010/2004 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005

Program harmonisasi tarif bea masuk terhadap 1.964 pos tarif yang meliputi produk-produk pertanian, perikanan, pertambangan, farmasi, keramik, dan besi baja. Dari jumlah ini, tarif bea masuk yang mengalami perubahan pada tahun 2005 adalah sebanyak 239 pos tarif (96 pos tarif mengalami kenaikan dan 143 pos tarif mengalami penurunan).

- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 28/PMK.010/2005 tanggal 18 Mei 2005

Dalam PMK tersebut tarif bea masuk 1.571 pos tarif diturunkan dari 5% menjadi 0%, sehingga secara keseluruhan saat ini terdapat 60,5% dari seluruh pos tarif memiliki tarif CEPT 0%. Jumlah pos tarif dengan tarif CEPT 0% secara bertahap akan bertambah sehingga pada tahun 2010 perdagangan antar negara ASEAN tidak terdapat lagi hambatan tarif bea masuk.

- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.010/2005 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Pebruari 2006

Selama tahun 2006 pemerintah telah melakukan program harmonisasi tarif yang menetapkan jadwal penyesuaian tarif bea masuk sejumlah 9.209 pos tarif, sehingga mendorong terjadinya penurunan rata-rata tarif umum/*Most-Favoured Nations* (MFN) dari 9,5% dalam tahun 2006 menjadi 7,8% di tahun 2007. Rata-rata tarif MFN untuk produk non pertanian yang semula 9,6% untuk tahun 2005 turun menjadi 9,2% dalam tahun 2006 dan dalam tahun 2007 terus menurun menjadi 7,2%. Demikian pula tarif MFN pertanian turun dari 12,1% tahun 2005 menjadi 11,7% tahun 2006 dan untuk tahun 2007 menjadi 11,6%. Pada saat ini lebih dari 75% tarif MFN sudah berkisar antara 0-10%.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

3.1.1. Model Referensi

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan studi yang pernah dilakukan, yaitu *Revenue Implications of Trade Liberalization in South Africa* (Matlanyane dan Harmse, 2000) yang digunakan sebagai referensi penggunaan *modeling* dalam mengukur produktivitas penerimaan bea masuk terhadap Produk Domestik Bruto dan pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan bea masuk.

Analisis penelitian menggunakan pendekatan ekonometrik dengan metode estimasi *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengukur produktivitas pajak perdagangan internasional/bea masuk yang disebabkan oleh perubahan Produk Domestik Bruto dan pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan bea masuk.

Untuk estimasi produktivitas pajak perdagangan internasional (bea masuk) digunakan persamaan yang mengadaptasi model (Osoro, 1993; Matlanyane dan Harmse, 2000) yaitu:

$$T = \phi Y^\alpha \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

$$\ln T = \ln \phi + \alpha \ln Y + \mu \dots\dots\dots (2)$$

dimana,

T = *customs revenue* (bea masuk)

Y = *GDP* (Produk Domestik Bruto/PDB)

α = ukuran untuk produktivitas bea masuk (*tax buoyancy*)

Sedangkan untuk mengestimasi pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap bea masuk mengadaptasi model dari (Ebrill et al 1999; Paudel, 2006), dan (Matlanyane dan Harmse, 2000) yang disesuaikan dengan ketersediaan data, yaitu penerimaan bea masuk (*trade revenue*) merupakan fungsi dari nilai impor (*import base*), nilai tukar (*exchange rate*), tarif bea masuk rata-rata (*average tariff rate*), dan *dummy variable* yang merepresentasikan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*).

Persamaan untuk estimasi fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

$$\ln TR = y_0 + y_1 \ln M + y_2 \ln W + y_3 D_1 + y_4 r + \mu \dots\dots\dots (3)$$

dimana,

TR = Penerimaan bea masuk (persentase dari PDB)

M = Nilai impor (persentase dari PDB)

W = Nilai tukar

r = tarif bea masuk rata-rata

D = variabel *dummy* untuk liberalisasi perdagangan

Rasio impor dibandingkan dengan PDB dimasukkan dalam persamaan dengan tujuan untuk mengisolasi efek liberalisasi perdagangan atas perdagangan internasional, yang akan terkait dengan efek penerimaan. Nilai tukar digunakan untuk menunjukkan efek ekonomi makro atas kebijakan liberalisasi perdagangan. Sedangkan variabel *dummy* dan tarif impor rata-rata untuk mengindikasikan dampak langsung dari pengurangan tarif rata-rata pada penerimaan pajak perdagangan internasional (bea masuk).

Hasil estimasi untuk persamaan (2) menunjukkan bahwa penerimaan bea masuk mempunyai produktifitas yang tinggi. Dan liberalisasi perdagangan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bea masuk

Analisa ekonometri menunjukkan *error term* berdistribusi normal dan tidak ada serial korelasi, *heteroscedasticity* atau adanya *misspecification errors* dalam regresi.

Koefisien GDP adalah *positive* dan *highly significant* seperti yang diharapkan. Implikasinya adalah kenaikan output akan menyebabkan kenaikan penerimaan pajak perdagangan yang lebih tinggi. Sehingga koefisien GDP menunjukkan bahwa penerimaan pajak mempunyai responsivitas yang tinggi terhadap perubahan output.

Koefisien *exchange rate* adalah negatif. Kondisi ini mempunyai dua implikasi, yang pertama adalah ketika depresiasi, volume impor akan turun dan akan menyebabkan hilangnya penerimaan pajak perdagangan. Yang kedua, faktanya koefisien ini tidak signifikan secara statistik,

sehingga implikasinya adalah nilai impor yang meningkatkan secara partial akan mengurangi penerimaan sebagai akibat dari rendahnya pajak perdagangan.

Koefisien *impor-GDP ratio* adalah negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa jika volume dan nilai naik, sebagai akibat liberalisasi perdagangan, penerimaan pajak impor akan turun.

Koefisien dari tarif rata-rata adalah positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pengurangan tarif rata-rata berakibat yang signifikan terhadap hilangnya penerimaan bea masuk yang juga diindikasikan dari koefisien *impor-GDP ratio*.

Berkaitan dengan kebijakan liberalisasi, variabel ini tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak perdagangan dalam jangka pendek.

Dalam paper ini disimpulkan dua hal, yaitu pertama, liberalisasi perdagangan dalam format reformasi tarif tidak mengurangi penerimaan bea masuk secara signifikan. Kedua, kebijakan makro ekonomi akan memberikan dorongan dan fasilitas yang signifikan terhadap kesuksesan liberalisasi perdagangan.

3.1.2. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah model sebagaimana yang dilakukan dalam studi; *Revenue Implications of Trade Liberalization in South Africa* (Matlanyane dan Harmse, 2000).

Untuk estimasi produktivitas pajak perdagangan internasional (bea masuk) modelnya adalah sebagai berikut:

$$T = \varphi Y^{\alpha} \epsilon$$

$$\ln T = \ln \varphi + \alpha \ln Y + \mu$$

dimana,

T = *customs revenue* (bea masuk)

Y = *GDP* (Produk Domestik Bruto/PDB)

α = ukuran untuk produktivitas bea masuk (*tax buoyancy*)

Pada penelitian ini, notasi *customs revenue* (bea masuk) dan *GDP* (Produk Domestik Bruto) diubah notasinya menjadi Y untuk *customs revenue* (bea masuk) dan X untuk *GDP* (Produk Domestik Bruto)

sebagaimana yang umum dilakukan dalam penelitian-penelitian. Oleh karena itu persamaan tersebut notasinya menjadi:

$$Y = \varphi X^{\alpha} \varepsilon \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\ln Y = \ln \varphi + \alpha \ln X + \mu \quad \dots\dots\dots (2)$$

dimana,

Y = *customs revenue* (bea masuk)

X = *GDP* (Produk Domestik Bruto/PDB)

α = ukuran untuk produktivitas bea masuk (*tax buoyancy*)

Sedangkan untuk mengestimasi pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap bea masuk mengadaptasi model dari (Matlanyane dan Harmse, 2000) yang disesuaikan dengan ketersediaan data, yaitu sebagai berikut:

$$\ln TR = y_0 + y_1 \ln M + y_2 \ln w + y_3 D + y_4 r + \mu \quad \dots\dots\dots (3)$$

dimana,

TR = Penerimaan bea masuk (persentase dari PDB)

M = Nilai impor (persentase dari PDB)

w = Nilai tukar

D = Variabel *dummy* untuk liberalisasi perdagangan

r = Tarif bea masuk rata-rata

Pada tahun 1997/1998, Negara Indonesia dan banyak negara mengalami krisis ekonomi, oleh karena itu untuk mengakomodir kejadian ekonomi tersebut ada penambahan variabel *dummy* krisis moneter/ekonomi.

Dalam penelitian dan penyusunan tesis ini digunakan analisa ekonometrika dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Squares/OLS*. Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan (*error*) setiap observasi terhadap garis regresi tersebut. Tujuan utama regresi adalah mengestimasi fungsi regresi populasi berdasarkan fungsi regresi sampel (Agus Widarjono, 2007).

Pemilihan model tersebut diatas dengan pertimbangan bahwa secara teori dinyatakan bahwa implikasi liberalisasi perdagangan bersifat

ambigu, tergantung dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi produktivitas dari pajak perdagangan internasional.

Dari beberapa studi yang dilakukan IMF dan Bank Dunia mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan bea masuk atau pajak perdagangan internasional adalah nilai impor, nilai tukar, tarif bea masuk rata-rata serta faktor lainnya seperti variabel *dummy* diberlakukannya kebijakan liberalisasi perdagangan.

Model tersebut digunakan untuk penelitian di negara Afrika Selatan yang menurut pendapat penulis mempunyai karakteristik ekonomi dan data-data yang tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia. Hal ini juga sesuai teori perdagangan internasional bahwa perdagangan internasional akan efektif jika kedua negara mempunyai skala ekonomi yang berimbang.

Karakteristik ekonomi yang sama antara negara Afrika Selatan dengan negara Indonesia juga dapat dilihat dari persentase penerimaan bea masuk dibandingkan dari total penerimaan yang rendah kurang lebih hanya 10% dari total penerimaan. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang diambil pun mempunyai kecenderungan yang sama yaitu dengan kebijakan penurunan tarif.

Pertimbangan lainnya yang menjadi alasan penggunaan model tersebut adalah adanya data-data sekunder yang tersedia pada instansi-instansi yang terkait apabila menggunakan model tersebut.

3.2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah perekonomian di Indonesia, khususnya berkaitan dengan indikator ekonomi berupa Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan pajak perdagangan internasional berupa bea masuk beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Penelitian mencakup periode tahun 1970 sampai dengan tahun 2007. Pilihan atas kurun waktu tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa menurut pendapat penulis, ruang lingkup penelitian telah cukup untuk memenuhi persyaratan secara akademik.

Dikarenakan yang mempunyai tugas memungut dan mengumpulkan pajak perdagangan internasional adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),

maka analisis permasalahan juga mempertimbangkan aspek-aspek atau kebijakan-kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh DJBC serta upaya-upaya reformasi birokrasi yang telah dan sedang dilakukan. Upaya tersebut sudah dilakukan DJBC sejak lama antara lain melalui reformasi yang dilakukan dengan asistensi IMF pada tahun 2002.

Berbagai upaya tersebut, pada dasarnya merupakan wujud komitmen DJBC dalam menjalankan fungsi dan misi yang diamanatkan oleh pemerintah, yaitu sebagai (Abdurachman:2002):

- 1) *Trade facilitator* atau pemberian fasilitas perdagangan
- 2) *Industrial Assistance* atau dukungan terhadap industri dalam negeri
- 3) *Revenue Collector* atau pemungutan penerimaan negara
- 4) *Community Protector* atau perlindungan masyarakat

Pada tahun 2006 DJBC melakukan reformasi tahap kedua dengan dibentuknya Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai. Hasil kajian Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai menunjukkan bahwa upaya peningkatan citra dan kinerja DJBC harus dilakukan melalui suatu perubahan secara total, tidak parsial, yaitu perubahan secara sistemik yang meliputi SDM, sistem dan prosedur, organisasi, dan adanya dukungan bagi peningkatan kesejahteraan pegawai. Perubahan secara sistemik ini dimanifestasikan dalam bentuk Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai.

Pada KPU Bea dan Cukai akan diterapkan *Key Performance Indicator* (KPI), dimana kinerja individu dan unit kerja akan dinilai dan diawasi oleh Unit Kepatuhan Internal. KPI berisi rincian indikator atau parameter dari setiap satuan kegiatan yang ada dalam suatu bidang kerja yang diberi nilai berupa kuantifikasi, yang harus dicapai atau dipenuhi oleh pegawai dalam suatu bidang kerja, yang merefleksikan ukuran atau standar kinerja organisasi. KPI sekaligus menjadi alat bagi manajemen dalam rangka membuat keputusan strategis bagi organisasi.

KPU Bea dan Cukai juga akan membuat *Client Service Charter* (CSC) dimana didalamnya berisi standar kualitas pelayanan yang akan diberikan oleh DJBC melalui KPU Bea dan Cukai. Didalamnya juga berisi berbagai cara yang dapat ditempuh pengguna jasa untuk memperoleh informasi dan saluran bagi pengguna jasa dalam memberikan pengaduan dan pujian terhadap kinerja DJBC. CSC ini menjadi bukti bagi upaya DJBC untuk mendengar kebutuhan pengguna jasa, transparan, akuntabel, dan *service-oriented organization*.

3.3. Data Penelitian

Data-data sekunder tahunan dalam periode 1970 sampai dengan 2007 yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut;

- a. Nilai impor, yaitu besarnya nilai impor (devisa bayar) selama periode penelitian tanpa membedakan jenis komoditi dengan satuan miliar rupiah. Dalam penelitian ini, nilai impor adalah persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio impor dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasukkan dengan tujuan untuk mengisolasi efek perdagangan bebas atas perdagangan internasional yang akan terkait dengan efek penerimaan.
- b. Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu PDB konstan dengan tahun dasar 1993 dengan satuan miliar rupiah
- c. Nilai tukar, yaitu nilai tukar rupiah terhadap US\$ dolar dalam satuan ribu rupiah. Nilai tukar digunakan untuk menunjukkan efek ekonomi makro atas kebijakan perdagangan bebas.
- d. Tarif bea masuk rata-rata dalam satuan persen. Tarif bea masuk rata-rata digunakan untuk mengindikasikan dampak langsung dari perdagangan bebas.
- e. Penerimaan bea masuk, yaitu besarnya penerimaan bea masuk dalam satuan persen, dikarenakan digunakan persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
- f. Kebijakan-kebijakan liberalisasi perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Variabel *dummy* liberalisasi perdagangan digunakan untuk mengindikasikan dampak langsung dari perdagangan bebas. Data-data kebijakan liberalisasi perdagangan adalah keputusan-keputusan pemerintah terkait paket-paket kebijakan ekonomi untuk kurun waktu 1986 sampai dengan 2007
- g. Penelitian-penelitian dengan topik atau permasalahan yang sejenis atau mendekati dengan topik tesis yang sedang ditulis

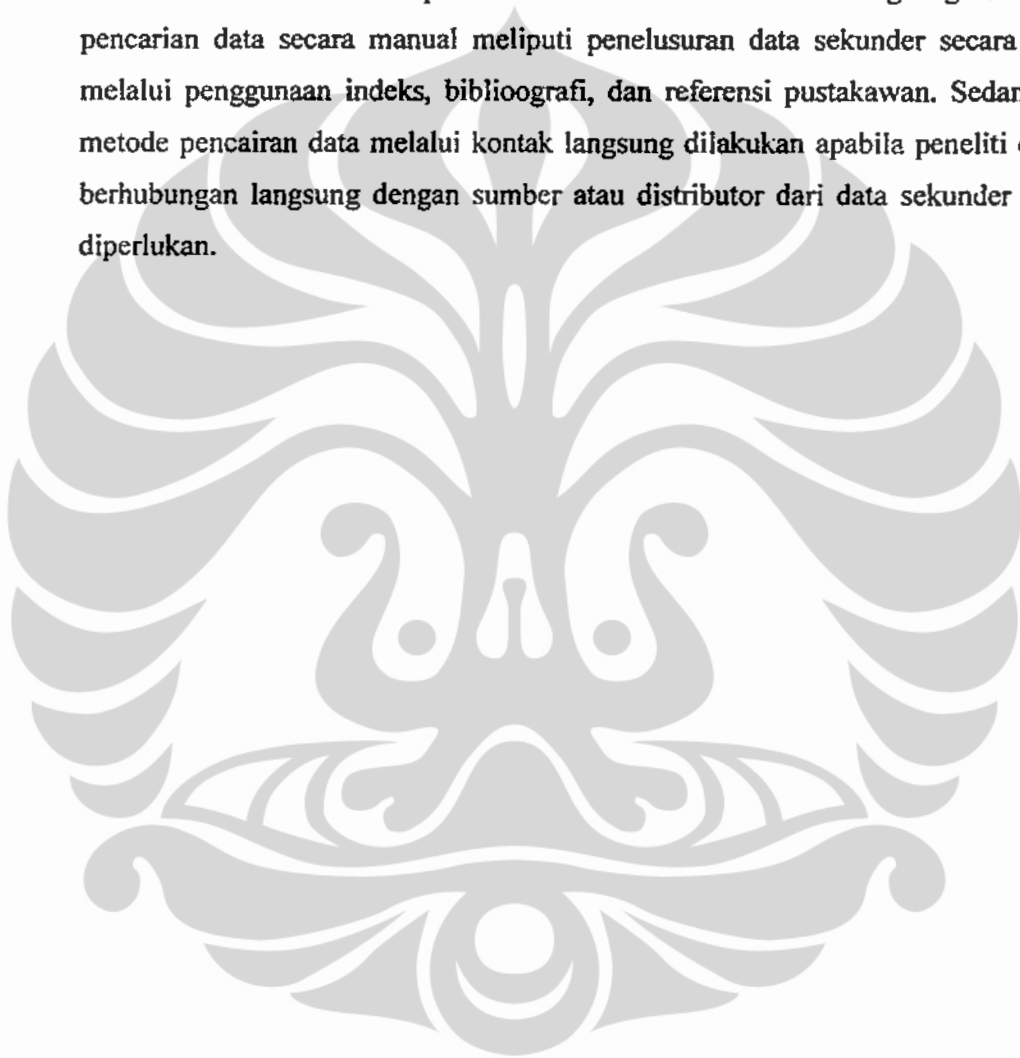
3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif, dimana apabila dilihat dari dimensi waktunya data yang digunakan adalah data runtut waktu (*time series*).

Sedangkan data yang digunakan menurut sumber datanya adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Penerimaan Bea Masuk pada Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai serta data sekunder lainnya yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan instansi pemerintah terkait lainnya. Alasan penggunaan data sekunder adalah dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian.

Metode pencarian data sekunder yang dilakukan adalah dengan pencarian data secara manual dan pencarian data melalui kontak langsung. Dimana pencarian data secara manual meliputi penelusuran data sekunder secara fisik melalui penggunaan indeks, bibliografi, dan referensi pustakawan. Sedangkan metode pencarian data melalui kontak langsung dilakukan apabila peneliti dapat berhubungan langsung dengan sumber atau distributor dari data sekunder yang diperlukan.



BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini asumsi normalitas data diteliti dengan statistik *Jarque-Bera*. Pengujian *Jarque-Bera* dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian tesis ini berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal.

Pengujian statistik *Jarque-Bera* diukur dengan membandingkan kemencengan (*skewness*) dan kelantipan (*kurtosis*). Asumsi normalitas terpenuhi atau data terdistribusi secara normal apabila nilai statistik *Jarque-Bera* yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabel *Chi-square* dan sebaliknya data tidak terdistribusi secara normal apabila nilai statistik *Jarque-Bera* yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel *Chi-square* (Agus Widarjono, 2007).

Jika suatu variabel didistribusikan secara normal maka nilai koefisien *skewness* adalah mendekati angka 0, dan nilai koefisien *kurtosis* adalah mendekati angka 3. Oleh karena itu, jika data terdistribusi normal maka diharapkan nilai statistik akan sama dengan 0. Nilai statistik JB ini didasarkan pada distribusi *Chi Squares* dengan derajat kebebasan (df) 2. Jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB besar atau dengan kata lain jika nilai statistik dari JB ini tidak signifikan, maka kita menerima hipotesis bahwa data mempunyai distribusi normal karena nilai statistik JB mendekati 0. Sebaliknya jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB kecil atau signifikan maka kita menolak hipotesis bahwa data mempunyai distribusi normal karena nilai statistik JB tidak sama dengan 0 (Agus Widarjono, 2007).

Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada data statistik deskriptif sebagaimana tertera pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Statistik deskriptif atas variabel yang diteliti

	<i>Y</i>	<i>X</i>	<i>TR</i>	<i>M</i>	<i>w</i>	<i>r</i>
Mean	3578.965	273288.5	0.895371	6.989165	3.299445	11.32873
Median	1389.500	244803.0	0.565430	7.790121	1.767000	8.977369
Maximum	16572.00	562464.0	3.132425	13.24057	10.26567	33.62744
Minimum	58.80000	77806.00	0.061025	0.685937	0.363000	2.913079
Std. Dev.	4698.734	142965.1	0.920887	3.490198	3.616273	8.151239
Skewness	1.441544	0.305535	1.195338	-0.358132	0.993577	1.192500
Kurtosis	3.755004	1.844141	3.082216	2.085815	2.189471	3.499243
Jarque-Bera	14.06231	2.706377	9.059980	2.135551	7.292422	9.400986
Probability	0.000884	0.258414	0.010781	0.343772	0.026090	0.009091
Observations	38	38	38	38	38	38

Dari Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa variabel terdistribusi normal kecuali variabel *Y* (bea masuk). Secara informal juga dapat terlihat dari nilai kemencengan yaitu ukuran asimetri distribusi data disekitar *mean* masing-masing variabel mendekati angka 0. Demikian juga dengan nilai kelantingan yaitu ukuran ketinggian distribusi masing-masing variabel mendekati angka 3.

Secara formal hampir semua variabel terdistribusi normal kecuali variabel *Y* (bea masuk). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai statistik *Jarque-Bera* yang dihasilkan oleh masing-masing variabel adalah lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabel *Chi-Squares* sebesar 11,070 (pada derajat bebas 5 dan level signifikansi 5%).

4.1.2. Uji Stasioner Data

Sebagaimana diketahui bahwa data *time series* merupakan sekumpulan nilai suatu variabel yang diambil pada waktu yang berbeda. Setiap data dikumpulkan secara berkala pada interval waktu tertentu.

Dalam melakukan regresi terhadap data yang bersifat runtut waktu (*time series*) masalah yang paling potensial adalah adanya data yang tidak stasioner yang dapat mengakibatkan terjadinya regresi lancung (*spurious regression*). Dalam penelitian juga dapat diperoleh observasi yang tidak

stasioner dapat menghasilkan residual yang stasioner, atau dikenal dengan sebutan Ko-Integrasi (Nachrowi dan Hardius Usman, 2006)

Regresi lancung terjadi jika koefisien determinasi cukup tinggi tapi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak mempunyai makna. Hal ini terjadi karena hubungan keduanya yang merupakan data *time series* hanya menunjukkan *trend* saja. Tingginya koefisien determinasi karena *trend* bukan karena hubungan antar variabel (Agus Widarjono, 2007).

Sekumpulan data dinyatakan stasioner jika nilai rata-rata dan varian dari data *time series* tersebut tidak mengalami perubahan secara sistemik sepanjang waktu, atau rata-rata dan variannya konstan (Nachrowi dan Hardius Usman, 2006). Dalam penelitian ini, data-data yang akan dilakukan penelitian diantaranya adalah data penerimaan bea masuk dan data Produk Domestik Bruto.

Pada penelitian ini, pengujian stasioneritas data dilakukan dengan menggunakan uji akar unit (*unit root test*) dengan memanfaatkan pengujian *Augmented-Dickey Fuller* (ADF-Test).

Prosedur untuk menentukan data stasioner atau tidak dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai statistik *Augmented-Dickey Fuller* (ADF) dengan nilai kritisnya dengan distribusi statistik Mackinnon. Jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai absolut statistik ADF lebih kecil dari nilai kritisnya, maka data tidak stasioner (Wing Wahyu, 2007).

Hasil pengujian dengan *Augmented-Dickey Fuller* (ADF-Test) sebagaimana tertera pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Hasil Pengujian Augmented-Dickey Fuller Test

Variable	Level of Stationarity	Trend	Intercept	Number of lags	t-value	Critical Value
Y	Level	Tidak	Tidak	1	1.703172	-1.6206
X	Level	Tidak	Tidak	1	3.103468	-1.6206

Hasil pengujian stasioneritas memperlihatkan variabel Y adalah stasioner pada tingkat stasioner level yang signifikan di level 10% atau hipotesis nol bahwa data merupakan *unit root* dapat ditolak. Demikian juga dengan variabel X stasioner pada tingkat stasioner level yang signifikan di level 10% atau hipotesis nol bahwa data merupakan *unit root* dapat ditolak.

Data-data lainnya yang digunakan dalam penelitian adalah data-data penerimaan bea masuk, nilai impor, nilai tukar, dan tarif bea masuk rata-rata. Untuk selanjutnya penelitian stasioner data dilakukan terhadap data-data penerimaan bea masuk, nilai impor, nilai tukar, dan tarif bea masuk rata-rata.

Hasil pengujian dengan *Augmented-Dickey Fuller* (ADF-Test) terhadap data-data penerimaan bea masuk, nilai impor, nilai tukar, dan tarif bea masuk rata-rata sebagaimana tertera pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Hasil Pengujian Augmented-Dickey Fuller Test

Variable	Level of Stationarity	Trend	Intercept	Number of lags	t-value	Critical Value
TR	1 st differences	Tidak	Tidak	1	-4.942876	-2.6300
M	1 st differences	Tidak	Tidak	1	-3.704978	-2.6300
w	1 st differences	Tidak	Tidak	1	-4.792317	-2.6300
r	1 st differences	Tidak	Tidak	1	-5.279670	-2.6300

* signifikan pada level 1%

Pada tabel diatas diperoleh informasi bahwa Variabel TR , M , w , dan r , tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada diferensial pertama dengan signifikan di level 1%.

Apabila terdapat satu atau tidak ada sama sekali variabel yang bersifat non-stasioner, OLS dapat langsung dijalankan sedangkan apabila terdapat dua atau lebih variabel yang bersifat non-stasioner maka disarankan dilakukan pengujian ko-integrasi. Oleh karena itu pada model persamaan dengan data yang telah didiferensial, akan dilakukan pengujian ko-integrasi untuk mengetahui ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel

yang tidak stasioner dan yang distasionerkan pada tingkat diferensial pertama (Nick Wilkins et. al. 2002).

4.1.3. Produktivitas Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk)

Untuk persamaan estimasi produktivitas pajak perdagangan internasional (bea masuk), mengadaptasi model (Osoro, 1993) serta (Matlanyane dan Harmse, 2000) yaitu:

$$T = \varphi Y^{\alpha} \varepsilon$$

$$\ln T = \ln \varphi + \alpha \ln Y + \mu$$

dimana,

T = *customs revenue* (bea masuk)

Y = *GDP* (Produk Domestik Bruto/PDB)

α = ukuran untuk produktivitas bea masuk (*tax buoyancy*)

Pada penelitian ini, notasi *customs revenue* (bea masuk) dan Produk Domestik Bruto diubah notasinya menjadi Y untuk *customs revenue* (bea masuk) dan X untuk Produk Domestik Bruto sebagaimana yang umum dilakukan dalam penelitian-penelitian.

Oleh karena itu persamaan tersebut notasinya menjadi:

$$Y = \varphi X^{\alpha} \varepsilon \quad \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan (1) tersebut dapat diestimasi dengan cara melakukan transformasi persamaan tersebut dalam bentuk persamaan logaritma natural (\ln) sebagai berikut:

$$\ln Y = \ln \varphi + \alpha \ln X + \mu \quad \dots \dots \dots (2)$$

dimana,

Y = *customs revenue* (bea masuk)

X = *GDP* (Produk Domestik Bruto/PDB)

α = ukuran untuk produktivitas bea masuk (*tax buoyancy*)

Persamaan (2) juga seringkali ditulis dalam persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X + \mu \quad \dots\dots\dots (3)$$

dimana,

$\beta_0 = \ln \varphi$ (konstanta atau intercep)

β_1 = ukuran untuk produktivitas bea masuk (*tax buoyancy*)

Model persamaan (3) dikenal sebagai model log linier. Didalam persamaan (3) sekarang model menjadi model linier baik dalam parameter (β_0 dan β_1) maupun linier dalam logaritma variabel (Y dan X) sehingga penelitian dapat menggunakan teknik OLS untuk mengestimasi persamaan tersebut.

Salah satu karakteristik penting dari model transformasi regresi eksponensial menjadi model log linier adalah bahwa slope koefisien β_1 merupakan elastisitas. Dimana elastisitas adalah prosentase perubahan variabel dependen Y yang disebabkan oleh prosentase perubahan variabel independen X .

Hasil *running program eviews 3.1* sebagaimana Lampiran 1 dan resume hasil regresi persamaan (3) adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Estimasi I Produktivitas
Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-28.72288	1.065951	-26.94577	0.0000
LOG(X)	2.895311	0.086120	33.61954	0.0000
R-squared	0.969132	F-statistic		1130.273
Adjusted R-squared	0.968275	Prob(F-statistic)		0.000000
Durbin-Watson stat	0.886371			

Setelah hasil regresi diketahui, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi hasil regresi untuk mengetahui seberapa baik hasil regresi. Evaluasi hasil regresi meliputi; tanda koefisien parameter estimasi, uji signifikansi pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* melalui uji t maupun uji nilai probabilitas t (ρ), uji seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel *dependen* melalui koefisien determinasi, uji asumsi-asumsi OLS, dan uji normalitas residual.

a. Uji Koefisien Parameter Estimasi

Hasil regresi menunjukkan tanda koefisien parameter X yang bernilai positif. Hal ini berarti bahwa kenaikan atau penurunan PDB akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan bea masuk. Dengan kata lain PDB berbanding lurus dengan penerimaan bea masuk.

b. Uji Statistik

Uji signifikansi dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* melalui uji t maupun uji nilai probabilitas t (ρ). Dilihat dari uji t-statistik, variabel PDB signifikan terhadap variabel bea masuk.

Koefisien Determinasi (*Goodness of fit*) yang dinotasikan dengan R^2 merupakan ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya.

Estimasi produktivitas pajak perdagangan internasional memperlihatkan *Goodness of fit* dari model dengan menghitung koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R-squared atau R^2 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0.969 (mendekati 1) yang berarti garis regresi menjelaskan sebesar 96,9% atau variasi PDB mampu menjelaskan variasi penerimaan bea masuk sebesar 96,9% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel pengganggu yang tidak masuk dalam persamaan.

c. Multikolinieritas

Salah satu asumsi yang digunakan dalam metode OLS adalah tidak ada hubungan linier antara variabel *independen*. Dikarenakan dalam persamaan ini hanya ada satu variabel *independen*, maka dapat dipastikan bahwa persamaan regresi dengan satu variabel *independen* tidak mengandung masalah multikolinieritas.

d. Heteroskedastisitas

Metode OLS mengasumsikan bahwa variabel gangguan mempunyai rata-rata nol dan mempunyai varian yang konstan atau varian bersifat homoskedastisitas.

Uji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan alat uji White Heteroskedasticity Test. Untuk model regresi yang banyak menggunakan variabel bebas disarankan untuk menggunakan White Heteroskedasticity Test (*no cross term*), sedangkan untuk yang lebih sedikit menggunakan White Heteroskedasticity Test (*cross term*) (Nachrowi, Usman, 2006).

Hasil *running eviews* uji White Heteroskedasticity Test (*cross term*) adalah sebagaimana Lampiran 2 dan resume hasil uji White Heteroskedasticity Test (*cross term*) sebagaimana Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji White Heteroskedasticity Test (*cross term*)

F-statistic	4.323894	Probability	0.020982
Obs*R-squared	7.528812	Probability	0.023181
R-squared	0.198127		

Nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,198. Nilai *Chi squares* hitung sebesar 7.5288, sedangkan nilai kritis *Chi squares* pada $\alpha = 5\%$ dengan df sebesar 2 adalah 5.99147. Karena nilai *Chi squares* hitung lebih besar dari nilai *Chi squares* kritis, maka dapat disimpulkan terdapat masalah heteroskedastisitas.

Adanya masalah heteroskedastisitas juga dapat dilihat dari nilai probabilitas *Chi squares* sebesar 2.3% lebih kecil dari 5% yang berarti signifikan.

e. Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah terjadi pada data runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Persamaan yang mengandung autokorelasi akan menyebabkan estimator tidak memenuhi kriteria *best linier unbiased estimator (BLUE)*.

Hasil uji residual pada model persamaan pertama dengan menggunakan statistik Durbin Watson atau uji D-W menunjukkan nilai sebesar 0.886371 yang apabila dibandingkan dengan tabel statistik D-W berada antara 0 dan d_L dengan kata lain menolak H_0 atau terdapat autokorelasi positif.

Adanya autokorelasi positif pada fungsi persamaan diatas dapat terjadi karena adanya hubungan yang sangat kuat antara data bea masuk dan PDB. Disamping itu data periode sekarang dari kedua variabel tersebut terlihat sangat dipengaruhi oleh data pada periode sebelumnya.

Untuk mengatasi masalah autokorelasi positif tersebut dipergunakan model *autoregressive* dengan proses *first-order autoregressive* atau *AR(1)*. Dasar pemakaian *AR(1)* adalah dari pengujian residual terhadap hasil estimasi persamaan awal dengan memanfaatkan uji Correlogram-Q Statistik.

Hasil pengujian dengan uji Correlogram-Q statistik menunjukkan bahwa batang di *lag* pertama pada grafik autokorelasi parsial signifikan berada di luar garis *Bartlett* sedang batang kedua dan seterusnya tidak signifikan karena berada di dalam batas garis *Bartlett*. Pengujian Correlogram-Q statistik dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Correlogram of Residual

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. ****	. ****	1	0.524	0.524	11.281	0.001
. **	. *	2	0.213	-0.085	13.196	0.001
. .	. *	3	0.024	-0.073	13.221	0.004
. *	. *	4	-0.136	-0.143	14.049	0.007
. **	. **	5	-0.290	-0.201	17.929	0.003
. ***	. **	6	-0.388	-0.194	25.089	0.000
. ***	. *	7	-0.350	-0.084	31.097	0.000
. *	. *	8	-0.162	0.077	32.419	0.000
. .	. .	9	-0.032	-0.013	32.471	0.000
. *	. .	10	0.099	0.050	33.006	0.000
. *	. .	11	0.148	-0.046	34.236	0.000
. *	. .	12	0.158	-0.036	35.689	0.000
. .	. **	13	-0.002	-0.235	35.689	0.001
. .	. .	14	-0.056	-0.013	35.888	0.001
. .	. *	15	-0.026	0.081	35.933	0.002
. *	. *	16	-0.084	-0.064	36.420	0.003

Hasil *running eviws* estimasi fungsi persamaan produktivitas pajak perdagangan internasional (bea masuk) dengan memasukkan *AR(1)* sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 dan resumennya sebagaimana Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Estimasi II Produktivitas
Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.47742	1.987168	-14.83389	0.0000
LOG(X)	2.953704	0.159397	18.53048	0.0000
AR(1)	0.517552	0.138352	3.740821	0.0007
R-squared	0.978278	F-statistic		765.6016
Adjusted R-squared	0.977000	Prob(F-statistic)		0.000000
Durbin-Watson stat	1.979496			

* koefisien $AR(1) = \rho$ (koefisien autokorelasi)

Dari hasil regresi dengan menambah $AR(1)$, maka langkah selanjutnya akan dianalisa apakah estimasi sudah tidak mengandung masalah autokorelasi.

Hasil uji residual pada model persamaan sebagaimana Tabel 4.7 dengan menggunakan statistik Durbin Watson atau uji D-W menunjukkan nilai sebesar 1.979496 yang apabila dibandingkan dengan tabel statistik D-W berada antara d_u dan $4-d_u$, atau dengan kata lain tidak menolak H_0 atau tidak terdapat autokorelasi dengan tingkat keyakinan sebesar 95% pada jumlah pengamatan sebanyak 38 buah.

Namun demikian uji autokorelasi dari Durbin-Watson mengandung beberapa kelemahan. Pertama, uji ini hanya berlaku jika variabel *independen* bersifat random atau stokastik. Jika uji ini memasukkan variabel *independen* yang bersifat nonstokastik seperti memasukkan variabel kelambanan (lag) dari variabel *dependen* sebagai variabel *independen* yang disebut dengan model autoregresif maka uji Durbin-Watson tidak dapat digunakan. Kedua, uji Durbin-Watson hanya berlaku jika hubungan autokorelasi antar residual dalam order pertama atau autoregresif order pertama disingkat $AR(1)$. Ketiga, model ini juga tidak bisa digunakan dalam kasus rata-rata bergerak (*moving average*) dari residual yang lebih tinggi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, untuk menguji masih ada tidaknya masalah autokorelasi dilakukan juga dengan alat uji *Lagrange Multiplier* (LM) test sebagaimana Tabel 4.8. Hasil *running eviws* uji LM test sebagaimana Lampiran 4.

Tabel 4.8
Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	0.158625	Probability	0.853983
Obs*R-squared	0.363219	Probability	0.833927
R-squared	0.009817		

Dengan melihat hasil uji dengan LM test dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi squares* sebesar 0.833927 yang lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hal ini dapat disimpulkan persamaan regresi tersebut sudah tidak mengandung autokorelasi.

Dikarenakan pada persamaan awal masih ada permasalahan heteroskedastisitas, maka akan dilakukan uji White untuk mendeteksi masih ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Hasil *running eviws* pengujian dengan metode White seperti tertera pada Lampiran 5 dan resumanya sebagaimana Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Uji White Heteroskedasticity Test (*cross term*)

F-statistic	1.665854	Probability	0.204088
Obs*R-squared	3.302105	Probability	0.191848
R-squared	0.089246		

Dari Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.089246 dan nilai *Chi squares* hitung sebesar 3.302105. Sedangkan nilai kritis *Chi squares* pada $\alpha=5\%$ dengan *degree of freedom* (df) sebesar 2 adalah sebesar 5.99147.

Karena nilai *Chi squares* hitung lebih kecil daripada nilai kritis *Chi squares*, maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Tidak adanya heteroskedastisitas juga bisa dilihat dari nilai probabilitas *Chi squares* sebesar 0.191848 (19,19%) yang lebih besar dari $\alpha=5\%$ yang berarti tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Setelah evaluasi hasil regresi dilakukan maka dalam penelitian ini, dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$(1) \ln Y_t - \rho \ln Y_{t-1} = (\beta_0 - \rho \beta_0) + \beta_1 (\ln X_t - \rho \ln X_{t-1}) + (\mu_t - \rho \mu_{t-1})$$

$$(2) \ln Y_t - 0.517552 \ln Y_{t-1} = (-29.477422 - (0.517552 * (-29.477422))) \\ + 2.953704 (\ln X_t - 0.517552 \ln X_{t-1})$$

$$(3) \ln Y_t = -14.221323 + 0.517552 \ln Y_{t-1} + 2.953704 \ln X_t - 1.528695 \ln X_{t-1}$$

$$R^2 = 0.978278$$

4.1.4. Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Terhadap Penerimaan Bea Masuk

Persamaan untuk mengestimasi pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap bea masuk mengadaptasi model dari (Ebrill et al, 1999; Paudel, 2006; Matlanyane dan Harmse, 2000) yang disesuaikan dengan ketersediaan data, yaitu penerimaan bea masuk (*trade revenue*) merupakan fungsi dari nilai impor (*import base*), nilai tukar (*exchange rate*), tarif bea masuk rata-rata (*average tariff rate*), dan *dummy variable* yang merepresentasikan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*).

Persamaan untuk estimasi fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

$$\ln TR = y_0 + y_1 \ln M + y_2 \ln w + y_3 D + y_4 r + \mu \dots\dots\dots (4)$$

dimana,

TR = Penerimaan bea masuk (persentase dari PDB)

M = Nilai impor (persentase dari PDB)

w = Nilai tukar

r = tarif bea masuk rata-rata

D = variabel *dummy* untuk liberalisasi perdagangan

Pada tahun 1997/1998, Negara Indonesia dan banyak negara mengalami krisis ekonomi, oleh karena itu untuk mengakomodir kejadian ekonomi tersebut ada modifikasi tentang *dummy* variabel menjadi sebagai berikut:

$$\ln TR = y_0 + y_1 \ln M + y_2 \ln w + y_3 D_1 + y_4 D_2 + y_5 r + \mu \dots\dots\dots (5)$$

dimana,

D_1 = variabel *dummy* untuk liberalisasi perdagangan

D_2 = variabel *dummy* untuk krisis ekonomi 1998

Hasil *running eviws* estimasi persamaan pengaruh liberalisasi terhadap penerimaan bea masuk bea masuk atau persamaan (5) dapat dilihat pada Lampiran 6, dan resumenya dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Estimasi I Pengaruh Liberalisasi Perdagangan pada Bea Masuk dengan data Tahunan 1970-2007

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.812568	0.153934	-18.27125	0.0000
LOG(M)	0.681151	0.060573	11.24512	0.0000
LOG(w)	0.257100	0.126410	2.033858	0.0503
r	0.060692	0.005291	11.47133	0.0000
DM FT1	0.340336	0.132829	2.562222	0.0153
DM CRS	-0.281572	0.187061	-1.505243	0.1421
R-squared	0.989867	F-statistic		625.2154
Adjusted R-squared	0.988284	Prob(F-statistic)		0.000000
Durbin-Watson stat	1.044916			

Setelah hasil regresi diketahui, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi hasil regresi untuk mengetahui seberapa baik hasil regresi. Evaluasi hasil regresi meliputi; tanda koefisien parameter estimasi, uji signifikansi pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* melalui uji t maupun uji nilai probabilitas t (p). Kemudian juga dilakukan pengujian seberapa baik model regresi menjelaskan variasi variabel

dependen melalui koefisien determinasi. Pengujian yang lainnya adalah pengujian normalitas residual serta uji asumsi-asumsi OLS.

a. Uji Koefisien Parameter Estimasi

Ditinjau dari koefisien parameter estimasi, maka hasil regresi menunjukkan hasil sebagaimana teori yang ada. Nilai impor mempunyai koefisien positif atau berpengaruh positif terhadap penerimaan bea masuk. Sedangkan variabel nilai tukar juga berkoefisien positif berpengaruh positif terhadap penerimaan bea masuk.

Variabel *dummy* liberalisasi berpengaruh positif terhadap penerimaan bea masuk. Sedangkan variabel krisis ekonomi berkoefisien negatif atau berpengaruh negatif terhadap penerimaan bea masuk

b. Uji Statistik

Uji signifikansi variabel-variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara parsial dapat dilihat dari nilai t-statistik serta probabilitas dari t-statistik (ρ). Dilihat dari t-statistik serta probabilitas dari t-statistik, variabel nilai impor mempunyai pengaruh yang signifikan.

Variabel nilai tukar juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bea masuk. Demikian juga dengan variabel tarif bea masuk rata-rata yang signifikan terhadap variabel penerimaan bea masuk.

Variabel *dummy* liberalisasi perdagangan mempunyai t-statistik serta probabilitas dari t-statistik (ρ) yang signifikan terhadap penerimaan bea masuk.

Sedangkan variabel *dummy* krisis ekonomi tidak signifikan. Dengan kata lain kejadian krisis ekonomi tidak mempengaruhi perubahan penerimaan bea masuk secara signifikan.

Sedangkan uji signifikansi variabel-variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai F-statistik. Hasil regresi menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel *independen* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen*.

Koefisien determiniasi R^2 menunjukkan angka sebesar 0.989867 (98,99%) yang menunjukkan bahwa garis regresi menjelaskan sebesar 98,99% atau variasi variabel *independen* mampu menjelaskan variasi variabel *dependen* sebesar 98,99% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel pengganggu yang tidak masuk dalam persamaan.

c. Heteroskedastisitas

Uji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan alat uji White Heteroskedasticity Test (*No Cross Term*). Hasil *running eviews* uji White Heteroskedasticity Test (*No Cross Term*) adalah sebagaimana Lampiran 7 dan resumennya sebagaimana Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian White Heteroskedasticity (*No Cross Term*)

F-statistic	3.993618	Probability	0.002702
Obs*R-squared	19.91929	Probability	0.010646
R-squared	0.524192		

Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai *Chi Squares* hitung sebesar 19.91929 lebih besar dari nilai kritis *Chi Squares*, dan probabilitasnya sebesar 1.06% lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan persamaan regresi mengandung masalah heteroskedastisitas.

d. Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan statistik Durbin Watson menunjukkan nilai sebesar 1.044916 yang apabila dibandingkan dengan tabel statistik D-W berada antara nilai 0 dan d_L , sehingga hasil regresi masih terdapat masalah autokorelasi positif.

Pengujian autokorelasi dilakukan juga dengan alat uji LM Test. Hasil *running eviews* uji autokorelasi dengan LM Test sebagaimana Lampiran 8 dan resumennya sebagaimana Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	5.562632	Probability	0.008814
Obs*R-squared	10.27981	Probability	0.005858
R-squared	0.270521		

Dari Tabel 4.12 diketahui bahwa nilai *Chi Squares* hitung sebesar 10.27981 lebih besar dari nilai kritis *Chi Squares*, dan probabilitasnya sebesar 0.597% lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan persamaan regresi mengandung masalah autokorelasi.

e. **Penyesuaian Model Estimasi**

Hasil regresi sebagaimana Tabel 4.10 ternyata masih belum memenuhi asumsi-asumsi OLS yang ditentukan. Disamping itu jika melihat stasionernya data, maka didapatkan bahwa data variabel *TR*, *M*, *w*, dan *r*, tidak stasioner pada tingkat level, namun stasioner pada diferensial pertama dengan signifikan di level 1%. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian model regresi sebagaimana Tabel 4.13. Hasil estimasi dilakukan dengan langkah-langkah yang bertujuan untuk menghasilkan persamaan yang diterima oleh pengujian statistik maupun pengujian ekonometrika.

Hasil *running eviws* regresi yang telah disesuaikan sebagaimana Lampiran 9 dan resumennya sebagaimana Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Estimasi II Pengaruh Liberalisasi Perdagangan pada Bea Masuk dengan data Tahunan 1970-2007

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LOG(M))	0.576605	0.142658	4.041882	0.0003
D(LOG(w))	0.201179	0.093010	2.162977	0.0381
D(r)	0.053157	0.008574	6.200063	0.0000
DM FT1	0.021438	0.031409	0.682557	0.4998
DM CRS	-0.001857	0.039155	-0.047425	0.9625
R-squared	0.818522	Durbin-Watson stat		1.833396
Adjusted R-squared	0.795837			

Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi hasil regresi untuk mengetahui seberapa baik hasil regresi. Dilihat dari t-statistik serta probabilitas dari t-statistik, variabel nilai impor mempunyai pengaruh yang signifikan.

Variabel nilai tukar juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bea masuk. Demikian juga dengan variabel tarif bea masuk rata-rata yang signifikan terhadap variabel penerimaan bea masuk.

Variabel *dummy* liberalisasi perdagangan dan variabel *dummy* krisis ekonomi mempunyai t-statistik serta probabilitas dari t-statistik (ρ) yang tidak signifikan terhadap penerimaan bea masuk. Dengan kata lain liberalisasi perdagangan dan kejadian krisis ekonomi tidak mempengaruhi perubahan penerimaan bea masuk secara signifikan.

Koefisien determinasi R^2 menunjukkan angka sebesar 0.818522 (81,85) yang menunjukkan bahwa garis regresi menjelaskan sebesar 81,85% atau variasi variabel *independen* mampu menjelaskan variasi variabel *dependen* sebesar 81,85% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel pengganggu yang tidak masuk dalam persamaan.

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan statistik Durbin Watson menunjukkan nilai sebesar 1.833396 yang apabila dibandingkan dengan tabel statistik D-W berada antara nilai d_u , dan $4 - d_u$ sehingga hasil regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Pengujian autokorelasi dilakukan juga dengan alat uji LM Test. Hasil *running eviws* uji autokorelasi dengan LM Test sebagaimana Lampiran 10 dan resumennya sebagaimana Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	0.394512	Probability	0.677454
Obs*R-squared	0.878600	Probability	0.644487
R-squared	0.023746		

Dari Tabel 4.14 diketahui bahwa nilai *Chi Squares* hitung sebesar 0.878600 lebih kecil dari nilai kritis *Chi Squares*, dan probabilitasnya sebesar 0.644487 lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan alat uji White Heteroskedasticity Test (*No Cross Term*). Hasil *running eviews* uji White Heteroskedasticity Test (*No Cross Term*) adalah sebagaimana Lampiran 11 dan resumennya sebagaimana Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Hasil Pengujian White Heteroskedasticity (*No Cross Term*)

F-statistic	2.516547	Probability	0.033650
Obs*R-squared	15.47602	Probability	0.050524
R-squared	0.418271		

Dari Tabel 4.15 diketahui bahwa nilai *Chi Squares* hitung sebesar 15.47602 lebih kecil dari nilai kritis *Chi Squares*, dan probabilitasnya sebesar 5.05% lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan persamaan regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Setelah dilakukan evaluasi atas asumsi-asumsi OLS, maka selanjutnya akan dilakukan interpretasi dari model. Hasil estimasi pada Tabel 4.13 dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$(1) \ln TR_t - \ln TR_{t-1} = 0.576605(\ln M_t - \ln M_{t-1}) + 0.201179(\ln w_t - \ln w_{t-1}) \\ + 0.053157(r_t - r_{t-1}) + 0.021438D_1 - 0.001857D_2$$

$$(2) \Delta \ln TR_t = 0.576605 \Delta \ln M_t + 0.201179 \Delta \ln w_t + 0.053157 \Delta r_t \\ + 0.021438D_1 - 0.001857D_2$$

$$R^2 = 0.818522$$

4.1.5. Model Koreksi Kesalahan (*Error Correction Model/ECM*)

Hasil pengujian dengan *Augmented-Dickey Fuller* (ADF-Test) sebagaimana tertera pada Tabel 4.3, diketahui bahwa variabel-variabel *TR*, *M*, *w*, dan *r* tidak stasioner pada tingkat stasioner level dan stasioner pada diferensial pertama dengan signifikan di level 1%.

Adanya data yang didiferensial untuk menjadi stasioner pada tingkat pertama kemungkinan besar akan mengakibatkan terjadinya ko-integrasi yang berarti terdapat hubungan jangka panjang di antara data-data tersebut. Untuk mengetahui ada tidaknya ko-integrasi terhadap variabel-variabel dilakukan pengujian ko-integrasi dengan menggunakan *Johansen Cointegration Test* yang terdapat pada aplikasi *Eviews*.

Hasil *running eviews* pengujian *Johansen Cointegration Test* adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 12 dan resumennya sebagaimana Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Hasil Pengujian Johansen Cointegration Test

Vari able	Eigen value	Likelihood Ratio	5 Percent Critical Value	1 Percent Critical Value	Hypothesized No. of CE(s)
<i>M</i>	0.681188	76.02834	47.21	54.46	None **
<i>r</i>	0.491476	34.87481	29.68	35.65	At most 1 *
<i>TR</i>	0.241982	10.53006	15.41	20.04	At most 2
<i>w</i>	0.015334	0.556313	3.76	6.65	At most 3

Ada tidaknya ko-integrasi didasarkan pada uji *Likelihood Ratio* (LR). Jika nilai hitung LR lebih besar dari nilai kritis LR maka kita menerima adanya kointegrasi sejumlah variabel dan sebaliknya jika nilai hitung LR lebih kecil dari nilai kritisnya maka tidak ada ko-integrasi.

Hasil pengujian *Johansen Cointegration Test* menunjukkan terjadinya ko-integrasi pada variabel *TR* dan *w* hal tersebut terlihat dari nilai *Likelihood Ratio* yang lebih kecil dari nilai kritisnya baik di tingkat keyakinan 5% ataupun 1%. Sedangkan pada tingkat keyakinan 1%, variabel *TR*, *r*, dan *w* menunjukkan terjadinya ko-integrasi.

Untuk mengatasi data yang berko-integrasi atau teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang maka diperlukan adanya koreksi dengan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ECM*) atau disebut juga dengan *Error Correction Model Mechanism* yang diadaptasi dari Engle-Granger dengan dua tahap pemrosesan.

Tahap pertama dengan menghitung nilai residual dari model persamaan pada Tabel 4.13 (Estimasi II Pengaruh Liberalisasi Perdagangan pada Bea Masuk dengan data Tahunan 1970-2007) dan tahap kedua dengan melakukan analisis regresi dengan memasukkan residual dari tahap pertama.

Running eviews estimasi dengan pendekatan ECM Engle-Granger dapat dilihat pada Lampiran 13 dan resumanya sebagaimana Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Estimasi Model ECM
Pengaruh Liberalisasi Perdagangan pada Bea Masuk

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.010287	0.033987	0.302676	0.7642
D(LOG(M))	-0.576459	0.116710	4.939233	0.0000
D(LOG(W))	0.186097	0.096754	1.923409	0.0640
D(R)	0.053582	0.005181	10.34158	0.0000
DM FTI	0.019755	0.044505	0.443881	0.6603
DM CRS	-0.021293	0.048806	-0.436271	0.6658
RESID01(-1)	-0.406112	0.167319	-2.427173	0.0214
R-squared	0.849301	F-statistic		28.17861
Adjusted R-squared	0.819161	Prob(F-statistic)		0.000000
Durbin-Watson stat	1.755830			

Koefisien kesalahan ketidakseimbangan RESID01(-1) atau *Error Correction (EC)* secara statistik signifikan berarti model spesifikasi ECM yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Nilai koefisien *EC* sebesar -0.406112 mempunyai makna bahwa perbedaan nilai aktual penerimaan bea masuk dengan keseimbangannya sebesar -0.406112 dan nilai absolut dari koefisien *EC* menjelaskan seberapa cepat waktu diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan.

Variabel $\Delta \ln M$, variabel $\Delta \ln w$, dan variabel Δr juga signifikan secara statistik dan bertanda positif. Dengan demikian dalam jangka pendek perubahan nilai impor, nilai tukar, dan tarif bea masuk rata-rata mempunyai pengaruh positif terhadap perubahan penerimaan bea masuk pada jangka pendek. Koefisien $\Delta \ln M$, $\Delta \ln w$ dan Δr adalah koefisien jangka pendeknya untuk variabel tersebut.

Sedangkan uji signifikansi variabel-variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai F-statistik. Hasil regresi menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel *independen* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependen*.

Koefisien determinasi R^2 menunjukkan angka sebesar 0.849301 (84,93%) yang menunjukkan bahwa garis regresi menjelaskan sebesar 84,93% atau variasi variabel *independen* mampu menjelaskan variasi variabel *dependen* sebesar 84,93% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel pengganggu yang tidak masuk dalam persamaan.

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan statistik Durbin Watson menunjukkan nilai sebesar 1.755830 yang apabila dibandingkan dengan tabel statistik D-W berada antara nilai d_u dan $4-d_u$, sehingga hasil regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Pengujian autokorelasi dilakukan juga dengan alat uji LM Test. Hasil *running eviws* uji autokorelasi dengan LM Test sebagaimana Lampiran 14 dan resumennya sebagaimana Tabel 4.18

Tabel 4.18
Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	0.792020	Probability	0.462815
Obs*R-squared	1.981119	Probability	0.371369
R-squared	0.053544		

Dari Tabel 4.18 diketahui bahwa nilai *Chi Squares* hitung sebesar 1.981119 lebih kecil dari nilai kritis *Chi Squares*, dan probabilitasnya sebesar 37.14% lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan alat uji White Heteroskedasticity Test (*No Cross Term*). Hasil *running eviews* White Heteroskedasticity Test (*No Cross Term*) adalah sebagaimana Lampiran 15 dan resumennya sebagaimana Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Hasil Pengujian White Heteroskedasticity (*No Cross Term*)

F-statistic	1.535161	Probability	0.182946
Obs*R-squared	13.73609	Probability	0.185373
R-squared	0.371246		

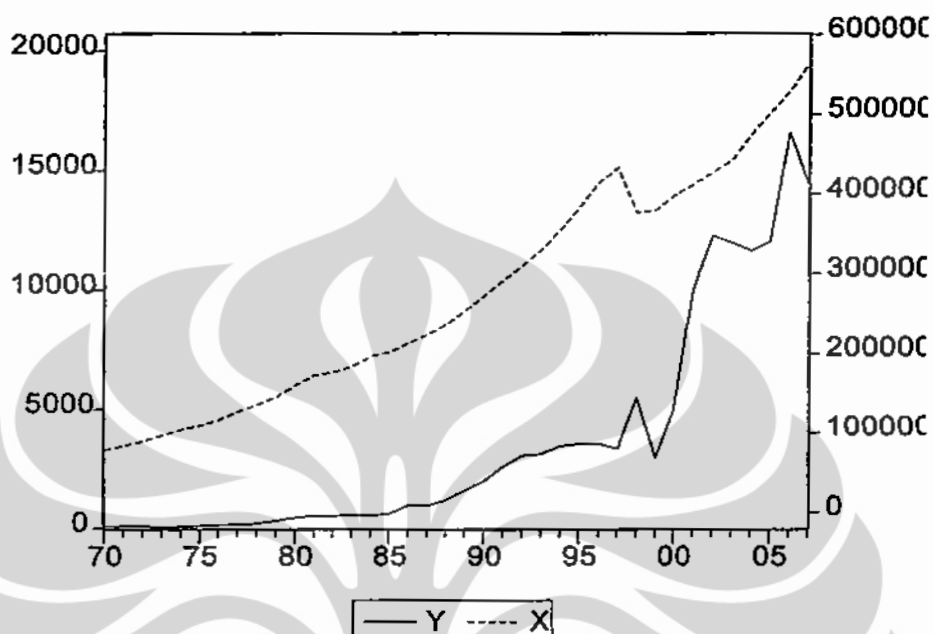
Dari Tabel 4.20 diketahui bahwa nilai *Chi Squares* hitung sebesar 13.73609 lebih kecil dari nilai kritis *Chi Squares*, dan probabilitasnya sebesar 18.54% lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan persamaan regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

4.2. Analisa dan Pembahasan

4.2.1. Analisa Produktivitas Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk)

Untuk mengetahui keterkaitan data bea masuk dan Produk Domestik Bruto selama kurun waktu penelitian dapat dianalisa sebagaimana Grafik 4.1.

Grafik 4.1.
Data Bea Masuk (Y) dan Produk Domestik Bruto (X)



Dari analisa grafik antara penerimaan bea masuk dan Produk Domestik Bruto. Kecenderungan kenaikan Produk Domestik Bruto diikuti juga dengan kecenderungan yang naik pada penerimaan bea masuk. Sehingga jika ditinjau dari aspek penerimaan bea masuk, kebijakan impor masih beraspek positif terhadap penerimaan bea masuk.

Data pada tahun 1999 sampai dengan 2001 menunjukkan kenaikan penerimaan bea masuk yang lebih tajam. Dimana pada tahun-tahun tersebut terjadi peningkatan kegiatan dan nilai impor. Demikian juga kondisi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

Kecenderungan yang sama-sama naik antara Produk Domestik Bruto dengan penerimaan bea masuk juga disebabkan oleh kemampuan kegiatan impor yang dapat memberikan stimulus terhadap tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan kegiatan ekspor.

Hasil regresi menunjukkan tanda koefisien parameter Produk Domestik Bruto yang bernilai positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan Produk

Domestik Bruto akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan bea masuk dengan tingkat pengaruh yang signifikan.

Koefisien penerimaan bea masuk pada tahun ke-(t-1) sebesar 0.52 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan sebesar 1% pada penerimaan bea masuk pada tahun ke-(t-1) akan menyebabkan perubahan penerimaan bea masuk pada tahun ke-t sebesar 0.52%.

Koefisien autokorelasi (ρ) ber-ordo 1 sebesar 0.52 menunjukkan bahwa ketidakseimbangan yang terjadi pada variabel penerimaan bea masuk di periode tahun lalu akan dikoreksi pada periode tahun sekarang sebesar sebesar 0.48

Koefisien produk domestik bruto pada tahun ke-t sebesar 2.95 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan sebesar 1% pada produk domestik bruto akan menaikkan penerimaan bea masuk pada tahun ke-t sebesar 2.95%.

Koefisien produk domestik bruto pada tahun ke-(t-1) sebesar -1.53 menunjukkan bahwa apabila terdapat penurunan sebesar 1% pada produk domestik bruto akan menurunkan penerimaan bea masuk pada tahun ke-t sebesar 1.53%.

Dengan demikian hipotesis dari penelitian yang menyatakan bahwa penerimaan bea masuk (*customs revenue*) mempunyai elastisitas yang positif terhadap perubahan produk domestik bruto dapat diterima. Nilai produktivitas pajak perdagangan internasional (*tax buoyancy*) sebesar 2.95 atau dapat dikatakan juga bahwa elastisitas Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan bea masuk menunjukkan bahwa kenaikan 1% Produk Domestik Bruto akan menaikkan penerimaan bea masuk sebesar 2.95%.

Dengan kata lain produktivitas penerimaan bea masuk atau elastisitas Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan bea masuk adalah sebesar 2.95 dan termasuk kategori elastisitas yang elastis, dimana perubahan nilai Produk Domestik Bruto akan menyebabkan perubahan nilai penerimaan bea masuk yang lebih besar.

Produk Domestik Bruto meliputi faktor-faktor konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Dengan asumsi faktor-faktor

konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor adalah tetap, maka kenaikan sebesar 1% nilai impor akan menyebabkan kenaikan nilai penerimaan bea masuk sebesar 2.95%.

Dengan kondisi tersebut, maka perlu dianalisa lebih lanjut tentang jenis barang impor yang dominan diimpor, apakah barang konsumsi (barang jadi) ataukah barang perantara (barang setengah jadi atau bahan baku). Dengan tingkat produktivitas atau elastisitas sebesar 2.95 persen, patut diduga bahwa sebagian besar barang yang diimpor adalah barang konsumsi. Sehingga hanya menyebabkan kenaikan unsur output nasional berupa tingkat konsumsi.

Sementara tingkat investasi dan ekspor cenderung mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Kondisi ini tentunya kurang baik bagi suatu perekonomian karena akan mendorong terjadinya defisit neraca perdagangan, karena tingkat impor lebih tinggi dari tingkat ekspornya.

Jika digunakan pendekatan elastisitas penghasilan, maka elastisitas Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan bea masuk bersifat elastis, dan jika barang bersifat elastis, maka dimasukkan dalam kategori barang kebutuhan primer dan barang mewah. Secara umum dapat diketahui bahwa barang mewah hanya dapat dinikmati oleh masyarakat tertentu dengan penghasilan yang tinggi atau tidak mempunyai efek yang luas dalam perekonomian.

Hal ini dapat menggambarkan bahwa dengan kenaikan impor akan menaikkan penerimaan bea masuk namun tidak memberikan efek yang luas bagi perekonomian atau output nasional, karena hanya menaikkan tingkat konsumsi.

Tentunya yang diharapkan oleh pemerintah bahwa kegiatan impor memberikan dorongan yang kuat terhadap peningkatan investasi serta pertumbuhan ekspor. Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh impor terhadap Produk Domestik Bruto secara keseluruhan maupun terhadap faktor-faktor Produk Domestik Bruto, seperti investasi dan tingkat ekspor perlu dilakukan penelitian tersendiri.

Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini berarti masih memberikan peluang impor barang konsumsi yang tinggi, yang tentunya tidak optimal dalam memberikan *value added* bagi perekonomian. Dapat juga diambil kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan perdagangan internasional belum cukup memberikan stimulus yang tinggi bagi peningkatan investasi maupun produksi yang beorientasi ekspor.

Faktor penyebab lainnya adalah pelaksanaan pengawasan barang impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum optimal, karena diduga masih maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Demikian juga dengan perilaku pengusaha, yang kemungkinan besar masih banyak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Misalnya adalah memberitahukan barang impor adalah bahan baku, namun kenyataannya adalah barang jadi, atau juga perusahaan yang memanfaatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, namun kenyataannya barang tidak diekspor, akan tetapi dijual di dalam negeri.

Terkait permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik terkait Sumber Daya Manusia, proses bisnis, maupun remunerasinya. Dan terkait reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2006 melakukan reformasi tahap kedua dengan dibentuknya Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea dan Cukai.

Hasil kajian Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai menunjukkan bahwa upaya peningkatan citra dan kinerja DJBC harus dilakukan melalui suatu perubahan secara total, tidak parsial, yaitu perubahan secara sistemik yang meliputi SDM, sistem dan prosedur, organisasi, dan adanya dukungan bagi peningkatan kesejahteraan pegawai. Perubahan secara sistemik ini dimanifestasikan dalam bentuk Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai.

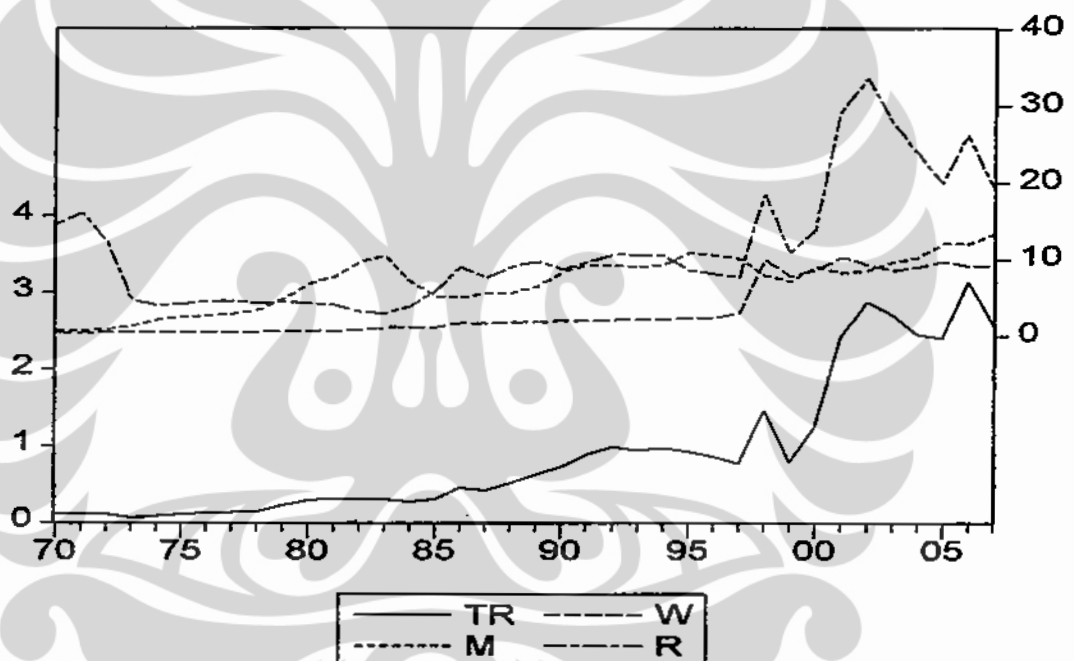
Disadari bahwa kunci utama bagi keberhasilan organisasi adalah kinerja SDM-nya. Dalam konteks KPU Bea dan Cukai, kebijakan yang diambil meliputi beberapa aspek yaitu pegawai harus menandatangani Pakta Integritas, memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas lingkungan

kerja dari KKN, memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai, memiliki integritas yang tinggi, dan mengutamakan kepentingan institusi DJBC.

4.2.2. Analisa Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Terhadap Penerimaan Bea Masuk

Grafik data penerimaan bea masuk, PDB, nilai impor, nilai tukar, dan tarif bea masuk rata-rata dapat dilihat pada Grafik 4.2.

Grafik 4.2
Data Penerimaan Bea Masuk (TR), Nilai Impor (M),
Nilai Tukar (w) dan tarif Bea Masuk rata-rata (r)
tahun 1970-2007



Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai penerimaan bea masuk hampir serupa dengan kecenderungan dari tingkat tarif bea masuk rata-rata. Sedangkan nilai impor dan nilai tukar mempunyai cenderung yang sama.

Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien nilai impor bernilai positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan, berarti kenaikan pada nilai impor akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan bea masuk dengan signifikan. Koefisien nilai impor sebesar 0.577 menunjukkan bahwa

apabila terdapat kenaikan sebesar 1% pada nilai impor pada tahun ke-t akan menaikkan penerimaan bea masuk pada tahun ke-t sebesar 0.577%.

Dari hasil penelitian ini, dengan pendekatan elastisitas maka dapat dikatakan bahwa perubahan dari nilai impor menyebabkan perubahan penerimaan bea masuk yang lebih rendah atau kategori elastisitas yang in-elastis. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah terkait pembebasan bea masuk untuk yang mendapatkan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat atau pun fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, dimana atas pemberian fasilitas tersebut untuk komponen bea masuknya ditangguhkan atau ditanggung pemerintah.

Faktor lainnya yang menyebabkan adalah optimalisasi pemeriksaan kewajaran nilai impor yang diberitahukan importir dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), karena disinyalir masih maraknya praktek perdagangan yang tidak sehat berupa *under invoicing*. Dimana untuk meminimalisasi praktek *under invoicing*, diperlukan tuntutan profesionalisme dan integritas pegawai DJBC serta dukungan data-data perbandingan yang terkini dan valid.

Untuk optimalisasi pemeriksaan nilai impor yang diberitahukan importir, juga diperlukan optimalisasi kebijakan pemeriksaan pada saat *post clearance audit* dibandingkan dengan pemeriksaan pada *pre clearance*. Keuntungan pemeriksaan *post clearance audit* adalah tidak menghambat proses percepatan pengeluaran barang, serta pemeriksaan yang lebih akurat dikarenakan dilakukan dengan mekanisme audit.

Koefisien nilai tukar (kurs rupiah terhadap dolar AS) bernilai positif berarti kenaikan pada nilai tukar (kurs rupiah terhadap dolar AS) akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan bea masuk. Koefisien nilai tukar (kurs rupiah terhadap dolar AS) sebesar 0.201 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan sebesar 1% pada nilai tukar akan menaikkan penerimaan bea masuk pada tahun ke-t sebesar 0.201%.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan kenaikan nilai tukar yang menyebabkan harga barang impor relatif menjadi lebih mahal, namun masih memberikan efek positif dan menaikkan penerimaan bea masuk. Hal ini bisa

disebabkan volume impor tidak mengalami penurunan yang drastis, karena permintaan barang impor untuk proses lebih lanjut menjadi barang yang berorientasi ekspor meningkat, sehingga kenaikan nilai tukar masih berkorelasi positif terhadap penerimaan bea masuk. Dengan kata lain, kenaikan nilai tukar mampu memberikan stimulus yang tinggi terhadap kegiatan ekspor.

Faktor lainnya sebagaimana pendekatan elastisitas penghasilan, barang konsumsi yang diimpor berkategori barang mewah, sehingga kenaikan harga barang masih tetap berpengaruh positif terhadap permintaan barang mewah.

Koefisien tarif bea masuk rata-rata bernilai positif berarti kenaikan pada tarif bea masuk rata-rata akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan bea masuk. Koefisien tarif bea masuk rata-rata sebesar 0.053 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan sebesar 1% pada tarif bea masuk rata-rata akan menaikkan penerimaan bea masuk pada tahun ke- t sebesar 5.32%.

Apabila dianalisa dari tabel tarif bea masuk rata-rata, maka diperoleh informasi bahwa kisaran periode 1999 sampai dengan 2007 ada kecenderungan peningkatan tingkat tarif bea masuk rata-rata, yang diikuti oleh kenaikan penerimaan bea masuk. Dimana pada periode tahun tersebut pemerintah mengambil kebijakan harmonisasi tarif.

Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk pada dasarnya adalah merupakan skema penyesuaian tarif bea masuk secara bertahap, sehingga tercipta suatu struktur tarif bea masuk yang harmonis, baik antarkelompok industri (hulu dan hilir) maupun antarproduk dalam suatu industri.

Tujuan Program Harmonisasi Tarif pada dasarnya adalah untuk;

- (i) mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri
- (ii) memberikan perlakuan yang adil untuk seluruh sektor industri
- (iii) memberikan kepastian berusaha bagi investor
- (iv) mengantisipasi Globalisasi ekonomi (AFTA, APEC, dan WTO)
- (v) meningkatkan efisiensi administrasi kepabeanan dan pencegahan penyelundupan.

Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk akan ditetapkan secara bertahap dengan memperhatikan tingkat daya saing produk nasional, memberikan kepastian hukum bagi investor, memberikan perlindungan bagi konsumen, dan meningkatkan efisiensi administrasi kepabeanan.

Program ini diberlakukan untuk seluruh sektor industri melalui penyesuaian tarif bea masuk secara bertahap sampai tahun 2010, dengan sasaran jangka menengah yaitu tingkat tarif bea masuk yang relatif harmonis, rendah, dan seragam (*uniform*) pada tahun 2010.

Pada tahap I telah ditetapkan Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk terhadap 1.964 pos tarif yang meliputi produk-produk pertanian, perikanan, pertambangan, farmasi, keramik, dan besi baja. Program ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 591/PMK.010/2004 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005. Dari jumlah ini, tarif bea masuk yang mengalami perubahan pada tahun 2005 adalah sebanyak 239 pos tarif (96 pos tarif mengalami kenaikan dan 143 pos tarif mengalami penurunan).

Selanjutnya, Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk tahap II ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.010/2005 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Pebruari 2006.

Selama tahun 2006 pemerintah telah melakukan Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk tahap II yang menetapkan jadwal penyesuaian tarif bea masuk sejumlah 9.209 pos tarif, sehingga mendorong terjadinya penurunan rata-rata tarif umum/*Most-Favoured Nations* (MFN) dari 9,5 persen dalam tahun 2006 menjadi 7,8 persen di tahun 2007.

Oleh karena itu, jika kebijakan pemerintah terhadap penerimaan bea masuk masih diandalkan untuk penerimaan nasional, maka kebijakan liberalisasi perdagangan dapat dilakukan dengan memfokuskan langkah-langkah harmonisasi tarif.

Koefisien variabel *dummy* kebijakan liberalisasi perdagangan bernilai positif berarti kebijakan liberalisasi perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan bea masuk. Dengan demikian hipotesis dari

penelitian yang menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penerimaan bea masuk tidak dapat diterima.

Sebagaimana studi-studi oleh IMF dan Bank Dunia yang menyatakan bahwa pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap penerimaan pajak internasional bersifat ambigu, tergantung banyak faktor diantaranya adalah elastisitas dari Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan bea masuk yang dimiliki. Dikarenakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa produktivitas dari penerimaan bea masuk tinggi, maka kebijakan liberalisasi perdagangan masih berkorelasi positif terhadap penerimaan bea masuk, walaupun kebijakan liberalisasi perdagangan lebih dominan berupa penurunan tarif.

Dengan hasil penelitian ini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan-kebijakan liberalisasi perdagangan masih mampu meningkatkan volume dari impor, dikarenakan kegiatan impor memberikan stimulus bagi kegiatan investasi, dan juga kegiatan ekspor.

Kebijakan-kebijakan liberalisasi perdagangan antar kawasan serta perjanjian-perjanjian bilateral yang dilakukan pemerintah juga mempunyai dampak terhadap peningkatan impor. Seperti kebijakan CEPT-AFTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, dikarenakan adanya insentif berupa penurunan tarif, sehingga pajak perdagangan menjadi lebih kecil, namun volume dan nilai impor meningkat, sehingga hasil akhirnya masih memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan bea masuk.

Didalam nota keuangan juga disebutkan bahwa kebijakan-kebijakan berupa ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA diharapkan dapat meningkatkan volume dan nilai impor dari kedua negara tersebut. Dimana peningkatan volume dan nilai impor akan memberikan stimulus terhadap peningkatan volumen ekspor kepada kedua negara tersebut.

Kebijakan liberalisasi perdagangan tersebut merujuk pada teori Heckser-Ohlin (H-O) yang mengemukakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan *endowment*. Perbedaan *opportunity cost* suatu produk antara suatu negara dengan negara lain dapat

terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) masing-masing negara.

Dari analisa terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, seperti kemudahan perijinan, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta pengurangan terhadap hambatan-hambatan non tarif yang diharapkan dapat mendorong investasi juga mempunyai dampak terhadap peningkatan impor.

Dikeluarkannya paket kebijakan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dan mengurangi hambatan yang menyebabkan kurangnya minat investor, dimana kebijakan ini meliputi kemudahan tataniaga ekspor non migas, fasilitas pengembalian bea masuk, fasilitas pembebasan bea masuk, dan pemberlakuan kawasan berikat juga mendorong peningkatan volumen importasi.

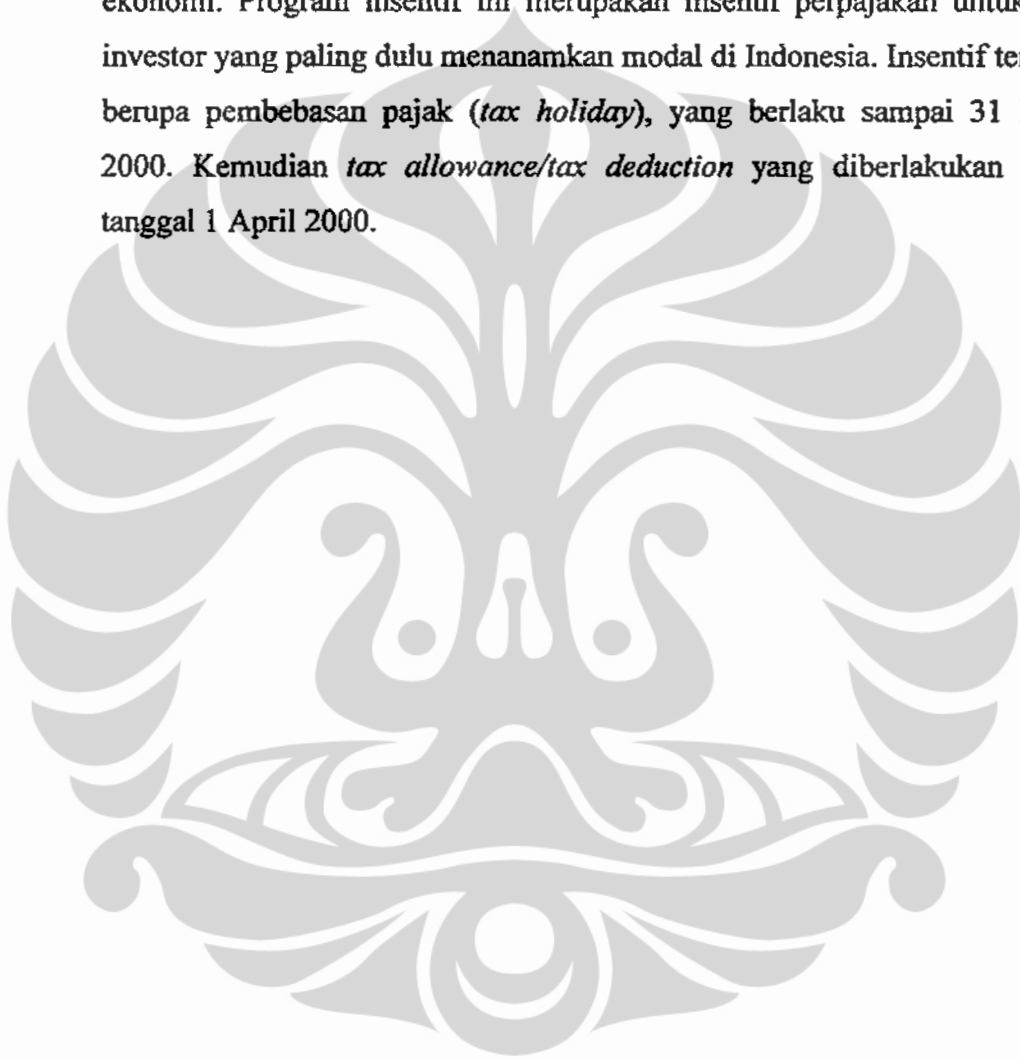
Disamping itu, kebijakan-kebijakan lainnya seperti pengurangan tata niaga impor, penyederhanaan prosedur dan fasilitas ekspor dan impor dengan melaksanakan harmonisasi tarif komoditi impor (termasuk komoditi pertanian) sesuai dengan perubahan daya saing, penyempurnaan bea masuk dan bea masuk tambahan, termasuk penghapusan harga normal, penghapusan tataniaga impor 27 pos tarif, dan penyempurnaan peraturan untuk kawasan berikat dan entrepot produksi tujuan ekspor juga menjadi faktor pendorong tumbuhnya kegiatan ekspor dan impor.

Koefisien variabel krisis ekonomi bernilai negatif berarti krisis ekonomi berpengaruh negatif terhadap penerimaan bea masuk. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi membawa dampak terhadap penurunan kegiatan impor.

Faktor lainnya adalah dengan adanya krisis ekonomi akan menurunnya tingkat pendapatan serta daya beli masyarakat, sehingga terjadi kekurangan pada sisi permintaan. Tingkat investasi juga sangat menurun, sehingga pada sisi penawaran pun mengalami penurunan, dalam hal ini kegiatan produksi barang ekspor juga mengalami penurunan yang sangat tajam. Secara ekonomi keseluruhan memang adanya krisis ekonomi sangat

memukul perekonomian baik ditinjau dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran, baik dipasar barang/jasa maupun pasar uang dan modal.

Untuk membantu mengatasi krisis ekonomi, pemerintah menerapkan berbagai insentif perpajakan dan penghapusan disinsentif bagi proyek-proyek penanaman modal yang menghadapi masalah akibat krisis ekonomi. Program insentif ini merupakan insentif perpajakan untuk para investor yang paling dulu menanamkan modal di Indonesia. Insentif tersebut berupa pembebasan pajak (*tax holiday*), yang berlaku sampai 31 Maret 2000. Kemudian *tax allowance/tax deduction* yang diberlakukan mulai tanggal 1 April 2000.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Analisa Produktivitas Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk)

- a. Hasil penelitian menunjukkan tanda koefisien parameter Produk Domestik Bruto yang bernilai positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan Produk Domestik Bruto akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan bea masuk dengan tingkat pengaruh yang signifikan.
- b. Koefisien produk domestik bruto pada tahun ke-t sebesar 2.95 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan sebesar 1% pada Produk Domestik Bruto akan menaikkan penerimaan bea masuk pada tahun ke-t sebesar 2.95%.
- c. Hipotesis dari penelitian yang menyatakan bahwa penerimaan bea masuk (*customs revenue*) mempunyai elastisitas yang positif terhadap perubahan produk domestik bruto dapat diterima. Nilai produktivitas pajak perdagangan internasional (*tax buoyancy*) atau elastisitas Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan bea masuk sebesar 2.95 menunjukkan bahwa kenaikan 1% Produk Domestik Bruto akan menaikkan penerimaan bea masuk sebesar 2.95%.
- d. Elastisitas Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan bea masuk sebesar 2.95 yang berarti termasuk kategori elastisitas yang elastis, maka perubahan dari Produk Domestik Bruto akan menyebabkan perubahan penerimaan bea masuk yang lebih besar.

5.1.2. Analisa Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Terhadap Penerimaan Bea Masuk

- a. Hasil penelitian menunjukkan koefisien nilai impor bernilai positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan, berarti kenaikan pada

- nilai impor akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan bea masuk dengan signifikan. Koefisien nilai impor sebesar 0.577 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan sebesar 1% pada nilai impor akan menaikkan penerimaan bea masuk sebesar 0.577%.
- b. Koefisien nilai tukar (kurs rupiah terhadap dolar AS) bernilai positif berarti kenaikan pada nilai tukar (kurs rupiah terhadap dolar AS) akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan bea masuk. Koefisien nilai tukar (kurs rupiah terhadap dolar AS) sebesar 0.201 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan sebesar 1% pada nilai tukar akan menaikkan penerimaan bea masuk pada tahun ke-t sebesar 0.201%.
 - c. Koefisien tarif bea masuk rata-rata bernilai positif berarti kenaikan pada tarif bea masuk rata-rata akan menyebabkan kenaikan pada penerimaan bea masuk. Koefisien tarif bea masuk rata-rata sebesar 0.053 menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan sebesar 1% pada tarif bea masuk rata-rata akan menaikkan penerimaan bea masuk pada tahun ke-t sebesar 5.3%.
 - d. Koefisien variabel *dummy* liberalisasi perdagangan bernilai positif berarti kebijakan liberalisasi perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan bea masuk. Dengan demikian hipotesis dari penelitian yang menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penerimaan bea masuk tidak dapat diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh variabel nilai impor, nilai tukar, dan tarif bea masuk rata-rata, maka jika kebijakan pemerintah terhadap penerimaan bea masuk masih diandalkan untuk penerimaan nasional disarankan untuk melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien nilai impor bernilai positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan bea masuk, sehingga untuk optimalisasi penerimaan bea masuk, kebijakan yang dapat dilakukan adalah;
- (i) *Assessment* yang dilakukan oleh Pejabat DJBC terhadap kebenaran pemberitahuan nilai impor barang harus dilakukan secara lebih optimal
 - (ii) Optimalisasi kebijakan *assessment* di *post clearance audit*, sehingga pemeriksaan akan lebih optimal dan tidak mengganggu proses kelancaran arus barang dan pelayanan kepabeanan
- b. Dengan liberalisasi perdagangan, kecenderungan tarif bea masuk rata-rata adalah menurun, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien tarif bea masuk rata-rata bernilai positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan bea masuk, sehingga kebijakan liberalisasi perdagangan dapat dilakukan dengan memfokuskan langkah-langkah harmonisasi tarif.
- c. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pajak perdagangan internasional (bea masuk), sehingga diperlukan penelitian lanjutan terkait pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pajak-pajak domestik, seperti Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penghasilan, serta pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ekspor.

DAFTAR REFERENSI

- Adelaide Matlanyane & Chris Harmse (2000), *Revenue Implications of Trade Liberalization in South Africa*, University of Pretoria,
- Dandapani Paudel, Dr (2006), *Revenue Implications of WTO Regime And Alternate Measures for Revenue Mobilization*, Economic Policy Network
- Ebrill, Liam et al (1999), *Revenue Implications of Trade Liberalization*, Occasional Papers 180, IMF
- Ebrill, Liam (2002), *Fiscal Dimension of Trade Liberalization: Development Trade and the WTO*, Handbook, The World Bank
- Nachrowi D Nachrowi & Hardius Usman (2006), *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika, Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Nachrowi D Nachrowi & Hardius Usman (2005), *Penggunaan Teknik Ekonometrika*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta
- Agus Widarjono (2007), *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua, Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta
- Wing Wahyu Winarno (2007), *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Gujarati, Damodar N (2003), *Basic Econometric*, 4th Edition. McGraw-Hill, New York, USA
- HS Kartadjoemena (1996), *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Eddy Abdurrachman (2002), *Program Reformasi Kebijakan di Bidang Kepabeanaan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Salvatore, Dominick (2002), *Managerial Economics Dalam Perekonomian Global*, Edisi Keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mudrajad Kuncoro, Ph.D (2003), *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Prathama Raihardja & Mandala Manurung (2004), *Pengantar Ilmu Ekonomi (MikroEkonomi & MakroEkonomi)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Jaringan Kebijakan Publik Indonesia, (2004), *Pilihan-Pilihan Kebijakan Perdagangan Indonesia*, JAJAKI, Jakarta

R. Hendra Halwani, Dr, (2005), *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Edisi Kedua, Ghafia Indonesia, Jakarta



Lampiran 1 : Hasil Estimasi I Produktivitas
Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk)
(untuk keterangan Tabel 4.4)

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Sample: 1970 2007
Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-28.72288	1.065951	-26.94577	0.0000
LOG(X)	2.895311	0.086120	33.61954	0.0000
R-squared	0.969132	Mean dependent var		7.074406
Adjusted R-squared	0.968275	S.D. dependent var		1.731846
S.E. of regression	0.308468	Akaike info criterion		0.536797
Sum squared resid	3.425486	Schwarz criterion		0.622986
Log likelihood	-8.199149	F-statistic		1130.273
Durbin-Watson stat	0.886371	Prob(F-statistic)		0.000000

Estimation Command:

=====

LS LOG(Y) C LOG(X)

Estimation Equation:

=====

LOG(Y) = C(1) + C(2)*LOG(X)

Substituted Coefficients:

=====

LOG(Y) = -28.72287511 + 2.895311357*LOG(X)

Lampiran 2 : Hasil Uji White Heteroskedasticity Test (*cross term*)
(untuk keterangan Tabel 4.5)

White Heteroskedasticity Test

F-statistic	4.323894	Probability	0.020982
Obs*R-squared	7.528812	Probability	0.023181

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Sample: 1970 2007

Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.57567	9.708373	2.737397	0.0097
LOG(X)	-4.358339	1.584557	-2.750509	0.0094
(LOG(X))^2	0.178850	0.064536	2.771322	0.0089
R-squared	0.198127	Mean dependent var		0.090144
Adjusted R-squared	0.152305	S.D. dependent var		0.126763
S.E. of regression	0.116711	Akaike info criterion		-1.382579
Sum squared resid	0.476749	Schwarz criterion		-1.253296
Log likelihood	29.26900	F-statistic		4.323894
Durbin-Watson stat	1.365388	Prob(F-statistic)		0.020982

Lampiran 3 : Hasil Estimasi II Produktivitas
Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk)
(untuk keterangan Tabel 4.7)

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1971 2007
Included observations: 37 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 5 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.47742	1.987168	-14.83389	0.0000
LOG(X)	2.953704	0.159397	18.53048	0.0000
AR(1)	0.517552	0.138352	3.740821	0.0007
R-squared	0.978278	Mean dependent var		7.147857
Adjusted R-squared	0.977000	S.D. dependent var		1.694666
S.E. of regression	0.257010	Akaike info criterion		0.198202
Sum squared resid	2.245842	Schwarz criterion		0.328817
Log likelihood	-0.666733	F-statistic		765.6016
Durbin-Watson stat	1.979496	Prob(F-statistic)		0.000000
Inverted AR Roots	.52			

Estimation Command:

=====
LS LOG(Y) C LOG(X) AR(1)

Estimation Equation:

=====
LOG(Y) = C(1) + C(2)*LOG(X) + [AR(1)=C(3)]

Substituted Coefficients:

=====
LOG(Y) = -29.47742193 + 2.953704166*LOG(X) + [AR(1)=0.5175518035]

Lampiran 4 : Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
(untuk keterangan Tabel 4.8)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.158625	Probability	0.853983
Obs*R-squared	0.363219	Probability	0.833927

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.472620	2.212988	-0.213567	0.8322
LOG(X)	0.037088	0.176929	0.209621	0.8353
AR(1)	0.177424	0.359446	0.493603	0.6250
RESID(-1)	-0.202090	0.409733	-0.493225	0.6252
RESID(-2)	-0.139878	0.263808	-0.530226	0.5996
R-squared	0.009817	Mean dependent var		-1.42E-12
Adjusted R-squared	-0.113956	S.D. dependent var		0.249769
S.E. of regression	0.263616	Akaike info criterion		0.296445
Sum squared resid	2.223795	Schwarz criterion		0.514136
Log likelihood	-0.484226	F-statistic		0.079312
Durbin-Watson stat	1.912827	Prob(F-statistic)		0.988116

Lampiran 5 : Hasil Uji White Heteroskedasticity Test (cross term)
(untuk keterangan Tabel 4.9)

White Heteroskedasticity Test

F-statistic	1.665854	Probability	0.204088
Obs*R-squared	3.302105	Probability	0.191848

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Sample: 1971 2007
Included observations: 37

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.54558	8.694643	1.212883	0.2335
LOG(X)	-1.745154	1.415097	-1.233240	0.2259
(LOG(X))^2	0.072403	0.057480	1.259619	0.2164
R-squared	0.089246	Mean dependent var		0.060698
Adjusted R-squared	0.035672	S.D. dependent var		0.097016
S.E. of regression	0.095270	Akaike info criterion		-1.786606
Sum squared resid	0.308594	Schwarz criterion		-1.655991
Log likelihood	36.05222	F-statistic		1.665854
Durbin-Watson stat	1.331126	Prob(F-statistic)		0.204088

Lampiran 6 : Estimasi I Pengaruh Liberalisasi Perdagangan pada
Bea Masuk dengan data Tahunan 1970-2007
(untuk keterangan Tabel 4.10)

Dependent Variable: LOG(TR)
Method: Least Squares
Sample: 1970 2007
Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.812568	0.153934	-18.27125	0.0000
LOG(M)	0.681151	0.060573	11.24512	0.0000
LOG(W)	0.257100	0.126410	2.033858	0.0503
R	0.060692	0.005291	11.47133	0.0000
DM_FT1	0.340336	0.132829	2.562222	0.0153
DM_CRS	-0.281572	0.187061	-1.505243	0.1421
R-squared	0.989867	Mean dependent var	-0.684304	
Adjusted R-squared	0.988284	S.D. dependent var	1.156789	
S.E. of regression	0.125211	Akaike info criterion	-1.173687	
Sum squared resid	0.501693	Schwarz criterion	-0.915121	
Log likelihood	28.30006	F-statistic	625.2154	
Durbin-Watson stat	1.044916	Prob(F-statistic)	0.000000	

Estimation Command:

=====
LS LOG(TR) C LOG(M) LOG(W) R DM_CRS DM_FT1

Estimation Equation:

=====
LOG(TR) = C(1) + C(2)*LOG(M) + C(3)*LOG(W) + C(4)*R + C(5)*DM_CRS +
C(6)*DM_FT1

Substituted Coefficients:

=====
LOG(TR) = -2.81256778 + 0.6811513899*LOG(M) + 0.2570995711*LOG(W) +
0.06069156381*R - 0.2815719762*DM_CRS +
0.3403363314*DM_FT1

Lampiran 7 : Hasil Pengujian White Heteroskedasticity (No Cross Term)
(untuk keterangan Tabel 4.11)

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	3.993618	Probability	0.002702
Obs*R-squared	19.91929	Probability	0.010646

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/01/08 Time: 03:36

Sample: 1970 2007

Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.097701	0.025095	3.893254	0.0005
LOG(M)	-0.052383	0.015956	-3.282917	0.0027
(LOG(M))^2	0.012335	0.005119	2.409782	0.0225
LOG(W)	0.017063	0.012848	1.328061	0.1945
(LOG(W))^2	0.001198	0.007753	0.154473	0.8783
R	-0.008461	0.002430	-3.482451	0.0016
R^2	0.000229	5.64E-05	4.054580	0.0003
DM_FT1	0.009573	0.015243	0.627981	0.5349
DM CRS	-0.014228	0.039747	-0.357957	0.7230
R-squared	0.524192	Mean dependent var	0.013202	
Adjusted R-squared	0.392935	S.D. dependent var	0.015719	
S.E. of regression	0.012248	Akaike info criterion	-5.763565	
Sum squared resid	0.004350	Schwarz criterion	-5.375715	
Log likelihood	118.5077	F-statistic	3.993618	
Durbin-Watson stat	1.861156	Prob(F-statistic)	0.002702	

Lampiran 8 : Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
(untuk keterangan Tabel 4.12)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	5.562632	Probability	0.008814
Obs*R-squared	10.27981	Probability	0.005858

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.019864	0.135979	0.146082	0.8848
LOG(M)	-0.001102	0.053440	-0.020620	0.9837
LOG(W)	0.020557	0.112011	0.183531	0.8556
R	-0.000445	0.004676	-0.095081	0.9249
DM_FT1	-0.035272	0.117951	-0.299038	0.7670
DM_CRS	-0.010592	0.166838	-0.063488	0.9498
RESID(-1)	0.602618	0.181756	3.315538	0.0024
RESID(-2)	-0.316926	0.183121	-1.730694	0.0938
R-squared	0.270521	Mean dependent var		1.26E-16
Adjusted R-squared	0.100310	S.D. dependent var		0.116444
S.E. of regression	0.110450	Akaike info criterion		-1.383850
Sum squared resid	0.365974	Schwarz criterion		-1.039095
Log likelihood	34.29314	F-statistic		1.589323
Durbin-Watson stat	1.878251	Prob(F-statistic)		0.176853

Lampiran 9 : Estimasi II Pengaruh Liberalisasi Perdagangan pada
Bea Masuk dengan data Tahunan 1970-2007
(untuk keterangan Tabel 4.13)

Dependent Variable: D(LOG(TR))

Method: Least Squares

Date: 11/29/08 Time: 22:44

Sample(adjusted): 1971 2007

Included observations: 37 after adjusting endpoints

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LOG(M))	0.576605	0.142658	4.041882	0.0003
D(LOG(W))	0.201179	0.093010	2.162977	0.0381
D(R)	0.053157	0.008574	6.200063	0.0000
DM_FT1	0.021438	0.031409	0.682557	0.4998
DM CRS	-0.001857	0.039155	-0.047425	0.9625
R-squared	0.818522	Mean dependent var		0.087604
Adjusted R-squared	0.795837	S.D. dependent var		0.263299
S.E. of regression	0.118970	Akaike info criterion		-1.294799
Sum squared resid	0.452925	Schwarz criterion		-1.077108
Log likelihood	28.95379	Durbin-Watson stat		1.833396

Estimation Command:

LS(N) D(LOG(TR)) D(LOG(M)) D(LOG(W)) D(R) DM_FT1 DM_CRS

Estimation Equation:

$D(\text{LOG}(\text{TR})) = C(1) \cdot D(\text{LOG}(\text{M})) + C(2) \cdot D(\text{LOG}(\text{W})) + C(3) \cdot D(\text{R}) + C(4) \cdot \text{DM_FT1} + C(5) \cdot \text{DM_CRS}$

Substituted Coefficients:

$D(\text{LOG}(\text{TR})) = 0.5766049912 \cdot D(\text{LOG}(\text{M})) + 0.2011793939 \cdot D(\text{LOG}(\text{W})) + 0.0531572398 \cdot D(\text{R}) + 0.0214384604 \cdot \text{DM_FT1} - 0.001856931889 \cdot \text{DM_CRS}$

Lampiran 10 : Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
(untuk keterangan Tabel 4.14)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.394512	Probability	0.677454
Obs*R-squared	0.878600	Probability	0.644487

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/29/08 Time: 23:07

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LOG(M))	0.021707	0.115396	0.188112	0.8521
D(LOG(W))	0.003957	0.101526	0.038973	0.9692
D(R)	-0.000255	0.005642	-0.045193	0.9643
DM_FT1	0.001336	0.037211	0.035891	0.9716
DM_CRS	-0.003309	0.053724	-0.061593	0.9513
RESID(-1)	0.091364	0.187717	0.486710	0.6300
RESID(-2)	-0.149235	0.191886	-0.777730	0.4428
R-squared	0.023746	Mean dependent var		0.004856
Adjusted R-squared	-0.171505	S.D. dependent var		0.112058
S.E. of regression	0.121287	Akaike info criterion		-1.212652
Sum squared resid	0.441318	Schwarz criterion		-0.907884
Log likelihood	29.43407	Durbin-Watson stat		1.982499

Lampiran 11 : Hasil Pengujian White Heteroskedasticity (No Cross Term)
(untuk keterangan Tabel 4.15)

White Heteroskedasticity Test

F-statistic	2.516547	Probability	0.033650
Obs*R-squared	15.47602	Probability	0.050524

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/29/08 Time: 23:06

Sample: 1971 2007

Included observations: 37

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.002575	0.004889	0.526734	0.6025
D(LOG(M))	0.008397	0.016713	0.502446	0.6193
(D(LOG(M)))^2	0.131645	0.067063	1.963008	0.0596
D(LOG(W))	0.012878	0.035281	0.365020	0.7178
(D(LOG(W)))^2	-0.016120	0.028713	-0.561424	0.5790
D(R)	-0.002718	0.002101	-1.293488	0.2064
(D(R))^2	0.000378	0.000241	1.568099	0.1281
DM_FT1	0.000225	0.004760	0.047285	0.9626
DM_CRS	-0.011384	0.014309	-0.795589	0.4330
R-squared	0.418271	Mean dependent var	0.012241	
Adjusted R-squared	0.252063	S.D. dependent var	0.024389	
S.E. of regression	0.021093	Akaike info criterion	-4.672011	
Sum squared resid	0.012457	Schwarz criterion	-4.280166	
Log likelihood	95.43219	F-statistic	2.516547	
Durbin-Watson stat	2.914483	Prob(F-statistic)	0.033650	

Lampiran 12 : Hasil Pengujian Johansen Cointegration Test
(untuk keterangan Tabel 4.16)

: 1970 2007

Included observations: 36

Test assumption: Linear deterministic trend in the data

Series: M R TR W

Lags interval: 1 to 1

Eigenvalue	Likelihood Ratio	5 Percent Critical Value	1 Percent Critical Value	Hypothesized No. of CE(s)
0.681188	76.02834	47.21	54.46	None **
0.491476	34.87481	29.68	35.65	At most 1 *
0.241982	10.53006	15.41	20.04	At most 2
0.015334	0.556313	3.76	6.65	At most 3

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level

L.R. test indicates 2 cointegrating equation(s) at 5% significance level

Lampiran 13 : Estimasi Error Correction Model (ECM)
(untuk keterangan Tabel 4.17)

Dependent Variable: D(LOG(TR))
Method: Least Squares
Date: 11/09/08 Time: 10:49
Sample(adjusted): 1971 2007
Included observations: 37 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.010287	0.033987	0.302676	0.7642
D(LOG(M))	0.576459	0.116710	4.939233	0.0000
D(LOG(W))	0.186097	0.096754	1.923409	0.0640
D(R)	0.053582	0.005181	10.34158	0.0000
DM_FT1	0.019755	0.044505	0.443881	0.6603
DM_CRS	-0.021293	0.048806	-0.436271	0.6658
RESID01(-1)	-0.406112	0.167319	-2.427173	0.0214
R-squared	0.849301	Mean dependent var		0.087604
Adjusted R-squared	0.819161	S.D. dependent var		0.263299
S.E. of regression	0.111969	Akaike info criterion		-1.372538
Sum squared resid	0.376109	Schwarz criterion		-1.067770
Log likelihood	32.39195	F-statistic		28.17861
Durbin-Watson stat	1.755830	Prob(F-statistic)		0.000000

Estimation Command:

=====
LS D(LOG(TR)) C D(LOG(M)) D(LOG(W)) D(R) DM_FT1 DM_CRS RESID01(-1)

Estimation Equation:

=====
 $D(\text{LOG}(\text{TR})) = C(1) + C(2)*D(\text{LOG}(\text{M})) + C(3)*D(\text{LOG}(\text{W})) + C(4)*D(\text{R}) + C(5)*\text{DM_FT1} + C(6)*\text{DM_CRS} + C(7)*\text{RESID01}(-1)$

Substituted Coefficients:

=====
 $D(\text{LOG}(\text{TR})) = 0.01028716605 + 0.5764585766*D(\text{LOG}(\text{M})) + 0.186097017*D(\text{LOG}(\text{W})) + 0.05358189559*D(\text{R}) + 0.01975499183*\text{DM_FT1} - 0.02129281164*\text{DM_CRS} - 0.4061122462*\text{RESID01}(-1)$

Lampiran 14 : Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
(untuk keterangan Tabel 4.18)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.792020	Probability	0.462815
Obs*R-squared	1.981119	Probability	0.371369

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/09/08 Time: 10:53

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.006027	0.034584	-0.174282	0.8629
D(LOG(M))	0.032075	0.120644	0.265862	0.7923
D(LOG(W))	0.012210	0.099348	0.122897	0.9031
D(R)	-0.000570	0.005286	-0.107861	0.9149
DM_FT1	0.006011	0.045626	0.131753	0.8961
DM_CRS	-0.005498	0.050251	-0.109418	0.9137
RESID01(-1)	-0.038609	0.229851	-0.167973	0.8678
RESID(-1)	0.148669	0.256261	0.580144	0.5665
RESID(-2)	-0.213596	0.206651	-1.033603	0.3102
R-squared	0.053544	Mean dependent var		-4.31E-17
Adjusted R-squared	-0.216872	S.D. dependent var		0.102213
S.E. of regression	0.112753	Akaike info criterion		-1.319460
Sum squared resid	0.355971	Schwarz criterion		-0.927615
Log likelihood	33.41002	F-statistic		0.198005
Durbin-Watson stat	1.946563	Prob(F-statistic)		0.988853

Lampiran 15 : Hasil Pengujian White Heteroskedasticity (Cross Term)
(untuk keterangan Tabel 4.19)

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.535161	Probability	0.182946
Obs*R-squared	13.73609	Probability	0.185373

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/09/08 Time: 10:53

Sample: 1971 2007

Included observations: 37

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001532	0.007379	-0.207566	0.8372
D(LOG(M))	0.002983	0.019636	0.151915	0.8804
(D(LOG(M)))^2	0.115673	0.066961	1.727481	0.0959
D(LOG(W))	0.027822	0.036134	0.769973	0.4483
(D(LOG(W)))^2	-0.020240	0.033044	-0.612496	0.5455
D(R)	-0.001812	0.000943	-1.920387	0.0658
(D(R))^2	0.000186	0.000101	1.837177	0.0776
DM_FT1	0.002998	0.007710	0.388840	0.7006
DM_CRS	-0.002442	0.009839	-0.248210	0.8059
RESID01(-1)	0.045165	0.033202	1.360328	0.1854
RESID01(-1)^2	0.132969	0.234251	0.567635	0.5752
R-squared	0.371246	Mean dependent var	0.010165	
Adjusted R-squared	0.129417	S.D. dependent var	0.018594	
S.E. of regression	0.017349	Akaike info criterion	-5.028749	
Sum squared resid	0.007826	Schwarz criterion	-4.549828	
Log likelihood	104.0319	F-statistic	1.535161	
Durbin-Watson stat	2.606228	Prob(F-statistic)	0.182946	

Lampiran 16:

DATA PENERIMAAN BEA MASUK, DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO

NO	TAHUN	PENERIMAAN BEA MASUK	PRODUK DOMESTIK BRUTO
1	1970	78.00	77,806.00
2	1971	98.60	83,271.10
3	1972	93.90	89,131.50
4	1973	58.80	96,354.60
5	1974	85.00	103,711.00
6	1975	111.20	108,873.00
7	1976	137.40	116,370.60
8	1977	163.60	126,566.20
9	1978	189.80	135,131.10
10	1979	316.75	145,028.50
11	1980	448.00	159,357.40
12	1981	536.19	171,989.90
13	1982	521.90	175,853.60
14	1983	556.97	183,227.10
15	1984	530.10	196,008.10
16	1985	607.20	200,857.70
17	1986	960.10	212,633.20
18	1987	938.00	223,107.40
19	1988	1,192.00	236,004.10
20	1989	1,587.00	253,601.90
21	1990	1,972.00	271,968.10
22	1991	2,574.00	291,563.40
23	1992	3,041.00	309,659.10
24	1993	3,106.00	329,775.80
25	1994	3,443.00	354,640.80
26	1995	3,543.00	383,792.30
27	1996	3,541.00	413,797.90
28	1997	3,322.00	433,245.90
29	1998	5,495.00	376,374.90
30	1999	2,950.00	379,557.70
31	2000	4,976.00	397,666.30
32	2001	9,975.00	411,691.00
33	2002	12,249.00	426,741.00
34	2003	11,960.00	442,178.00
35	2004	11,636.00	474,500.00
36	2005	12,018.00	501,417.00
37	2006	16,572.00	529,047.00
38	2007	14,417.00	562,464.00

Keterangan:

1. Data dalam miliar rupiah
2. PDB tahun dasar tahun 1993

Lampiran 17:

DATA PENERIMAAN BEA MASUK (TR), NILAI IMPOR (M), NILAI TUKAR (w), TARIF RATA-RATA (r)

NO	TAHUN	TR	M	w	r	DM_FT1	DM_CRS
1	1970	0.10	0.69	0.36	14.61	0.00	0.00
2	1971	0.12	0.74	0.39	16.10	0.00	0.00
3	1972	0.11	0.87	0.42	12.15	0.00	0.00
4	1973	0.06	1.30	0.42	4.70	0.00	0.00
5	1974	0.08	2.10	0.42	3.90	0.00	0.00
6	1975	0.10	2.43	0.42	4.21	0.00	0.00
7	1976	0.12	2.63	0.42	4.49	0.00	0.00
8	1977	0.13	2.87	0.42	4.51	0.00	0.00
9	1978	0.14	3.34	0.44	4.21	0.00	0.00
10	1979	0.22	4.95	0.63	4.42	0.00	0.00
11	1980	0.28	6.80	0.63	4.13	0.00	0.00
12	1981	0.31	7.72	0.64	4.04	0.00	0.00
13	1982	0.30	9.59	0.69	3.10	0.00	0.00
14	1983	0.30	10.43	0.99	2.91	0.00	0.00
15	1984	0.27	7.08	1.08	3.82	0.00	0.00
16	1985	0.30	5.11	1.13	5.92	0.00	0.00
17	1986	0.45	5.04	1.66	8.96	1.00	0.00
18	1987	0.42	5.54	1.65	7.58	1.00	0.00
19	1988	0.51	5.61	1.73	9.00	1.00	0.00
20	1989	0.63	6.45	1.81	9.70	1.00	0.00
21	1990	0.73	8.30	1.90	8.74	1.00	0.00
22	1991	0.88	9.21	1.95	9.59	1.00	0.00
23	1992	0.98	9.23	2.03	10.64	1.00	0.00
24	1993	0.94	8.93	2.09	10.54	1.00	0.00
25	1994	0.97	9.29	2.16	10.44	1.00	0.00
26	1995	0.92	10.84	2.25	8.52	1.00	0.00
27	1996	0.86	10.56	2.35	8.10	1.00	0.00
28	1997	0.77	10.01	2.95	7.66	1.00	0.00
29	1998	1.46	7.86	9.87	18.57	1.00	1.00
30	1999	0.78	7.17	7.81	10.84	1.00	1.00
31	2000	1.25	9.04	8.53	13.85	1.00	1.00
32	2001	2.42	8.22	10.27	29.48	1.00	1.00
33	2002	2.87	8.54	9.26	33.63	1.00	1.00
34	2003	2.70	9.66	8.57	27.99	1.00	1.00
35	2004	2.45	10.24	8.99	23.94	1.00	1.00
36	2005	2.40	12.00	9.75	19.98	1.00	1.00
37	2006	3.13	11.96	9.14	26.18	1.00	1.00
38	2007	2.56	13.24	9.16	19.36	1.00	1.00

Keterangan:

1. Data dalam miliar rupiah
2. Nilai tukar (Rupiah terhadap US\$) dalam ribuan rupiah
3. Tarif bea masuk rata-rata dalam persen (%)
4. PDB harga konstan tahun dasar tahun 1993
5. Bea masuk dan Nilai impor (persentase dari PDB)